

**PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI
KABUPATEN PASURUAN**

**Studi pada SMP Negeri 1 Pandaan, Kecamatan Pandaan,
Kabupaten Pasuruan**

SKRIPSI

Diajukan untuk menempuh ujian sarjana pada Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya

IKA DESI ALINDA

NIM. 0310310066



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

2008

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Penerapan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Guna Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi pada SMP Negeri 1 Pandaan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan)

Disusun oleh : Ika Desi Alinda

NIM : 0310310066-31

Fakultas : Ilmu Administrasi

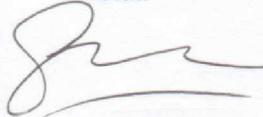
Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi : Administrasi Pembangunan

Malang, 29 November 2007

Komisi Pembimbing

Ketua



Drs. Suryadi M.S.

NIP. 130890054

Anggota



Drs. Stefanus Pani Rengu

NIP. 131131031

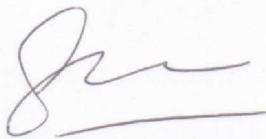
TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Senin
 Tanggal : 28 Januari 2008
 Jam : 09.00
 Skripsi atas nama : Ika Desi Alinda
 Judul : Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Pasuruan (Studi di SMPN 1 Pandaan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan)

dan dinyatakan lulus

MAJELIS PENGUJI



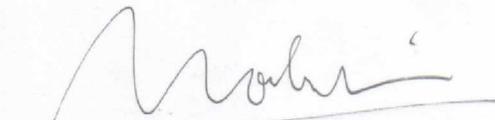
Dr. Suryadi, MS
Ketua



Drs. Stefanus Pani Rengu
Anggota



Prof. Dr. Sumartono, MS
Anggota



Drs. Sukanto, MS
Anggota

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan tersebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, Desember 2007

Mahasiswa

Nama : Ika Desi Alinda

NIM : 0310310066-31

RINGKASAN

Ika Desi Alinda, 2008, **Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Pasuruan** (Studi pada SMP Negeri 1 Pandaan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan), Dr. Suryadi, MS, Drs. Stefanus Pani Rengu, 97 hal + xii

Kenaikan harga BBM pada tahun 2005 mengakibatkan harga-harga kebutuhan meningkat drastis, sehingga rakyat kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk kebutuhan pendidikan. Ini menyebabkan program penuntasan Wajib Belajar 9 tahun semakin sulit terwujud. Oleh karena itu, pemerintah mengupayakan program PKPS-BBM Bidang Pendidikan yang diberikan dalam bentuk dana BOS. Meskipun tujuan utama program BOS adalah pemerataan dan perluasan akses masyarakat pada pendidikan, program juga pada akhirnya ditujukan untuk peningkatan mutu pendidikan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan program BOS di SMP Negeri 1 Pandaan guna meningkatkan mutu pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian ini difokuskan pada 2 (dua) hal yaitu: (1) penerapan program BOS, yang di dalamnya menguraikan tentang instansi terkait dalam penerapan program BOS, mekanisme penyaluran dana BOS, mekanisme penerapan program BOS yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Pandaan, mekanisme monitoring dan pelaporan dari program BOS yang dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten Pasuruan pada sekolah, hasil penerapan program BOS di SMP negeri 1 Pandaan; dan (2) kendala-kendala yang dihadapi baik kendala intern maupun kendala ekstern.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran dana BOS hingga sampai ke rekening sekolah jauh tidak berbeda jauh seperti yang ada dalam juklak BOS. Penyaluran dana telah dapat dilakukan tepat waktu ke masing-masing sekolah. Sisa dana yang ada dikembalikan ke Kas Negara.

Mekanisme penerapan program BOS di SMP Negeri 1 Pandaan dilaksanakan dengan lancar. Dana BOS juga dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan operasional sekolah yang dianjurkan. Namun, masih terdapat kendala-kendala seperti kurangnya tenaga pelaksana di sekolah. Di samping itu, adanya persepsi masyarakat yang salah yang menganggap dengan adanya program BOS pendidikan bisa gratis. Pada kenyataannya hal itu sulit terwujud karena kebutuhan tiap sekolah berbeda dan untuk SMP Negeri 1 Pandaan yang berada di daerah perkotaan, kebutuhannya diatas dana BOS.

Dengan adanya dana BOS terbukti bisa meringankan biaya pendidikan. Namun untuk peningkatkan mutu masih belum terlihat. Perkaitan hasil penelitian tersebut, peneliti menyarankan agar pemerintah bisa terus melanjutkan program ini karena memang meringankan beban pendidikan siswa, perlu adanya koordinasi dari instansi-instansi terkait sehingga menjadi lebih tertib. Selain itu, disarankan juga untuk menambah tenaga pelaksana.

SUMMARY

Ika Desi Alinda, 2007, **The Applying Relief Fund of School Operational Program (BOS) to Improve Education Quality (Study at Public Junior High School 1 Pandaan, Pandaan District, Pasuruan Sub-province)**, Drs. Suryadi MS, Drs. Stefanus Pani Rengu, 91 pages + xii

The increasing of oil fuel price caused the basic needs mount drastically, so that people difficult to fullfil their basic needs including the education needs. It has caused the Wajar program was getting hard to be finished. Therefore, government has striven the PKPS-BBM program which gave in BOS fund. Though the main target of BOS program is extension and generalization acces in education, in the end this program also purposed to increase the education quality.

The purpose of research is to describe and to analyze the applying of BOS program in Public Junior High School 1 Pandaan to improve the education quality. This research uses a qualitative method. It was focused by two point, there were: (1) the applying of BOS program, that elaborates the relevant institution for applying BOS program, the mechanism of BOS fund spreading, the mechanis of applying BOS program in public junior high school 1 pandaan, the mechanism of monitoring and reporting BOS program by BOS Management Team at Pasuruan Sub-province to the school, the result of BOS program in Public Junior High School 1 Pandaan; (2) the constraints faced, it was not only the intern constraints but also the extern constraints.

The result of research showed that the mechanism of BOS program division similar with the rules. The division of fund have been done on schedule to each school. Rest of existing fund has returned to the Exchequer.

The mechanism of applying BOS program has executed fluently. The BOS fund is allocated for the school operational activites. But there were still constraints such as lack of executor at school. Besides, there were wrong perception which assume that education charge can be free by BOS program. Practically, it's difficult because the requirement every school is different and Public Junior High School 1 Pandaan located in urban area, so that its requirement above the BOS fund.

The BOS program can be lighten the education expense. But, the improve of education quality has not seen yet. Bearing the result of research, the researcher suggest that government continue this program because it is lighten the education expense. Also there're coordinating from the relevant institutions so that it can be more orderly. Besides, the researcher suggested to add the executor of BOS program.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Pasuruan (Studi pada SMP Negeri 1 Pandaan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten).

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih banyak kekurangan. Namun atas dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak maka skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. DR. Suhadak, M.Ec, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
2. Bapak Prof. DR. Solichin A.W, selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
3. Bapak Drs. Suryadi M.S dan Bapak Drs. Stefanus Pani Rengu, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran dan masukan dengan sabar sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah berkenan memberikan ilmu dengan sabar dan ikhlas, semoga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami.
5. Kedua orang tuaku tercinta dan adik-adikku yang telah memberikan kasih sayang, doa dan semangat serta dukungan materiil & moril yang tiada henti.
6. Bapak Hisyam MPd, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pandaan yang telah memberikan ijin untuk melaksanakan penelitian di SMP Negeri 1 Pandaan.
7. Ibu Dra. Rien Sulistyowati, selaku bendahara SMP Negeri 1 Pandaan yang telah memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.
8. Bapak Drs. Bambang Pudjiono, MSi, selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian.

9. Ibu Drs. Enidah Made MPd beserta staf Subag Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan yang telah memberikan data yang diperlukan untuk penelitian ini.
 10. Teman-temanku di FIA khususnya Publik B '03 yang telah memberi banyak kenangan dari awal sampai akhir. Terima kasih untuk semua bantuannya.
- Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Desember 2007

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	
TANDA PENGESAHAN	
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	
RINGKASAN.....	iii
SUMMARY	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR BAGAN	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kontribusi Penelitian.....	7
E. Kerangka Pemikiran	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Pembangunan.....	9
1. Pengertian Pembangunan	9
2. Paradigma Pembangunan	11
B. Pendidikan	12
1. Pengertian Pendidikan	12
2. Mutu Pendidikan.....	14
C. Peran Pemerintah dalam Pembangunan Pendidikan.....	16
D. Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM)	18
1. Tujuan Program PKPS-BBM	18
2. Kebijakan Program PKPS-BBM	18
3. Landasan Hukum	19
E. Program Bantuan Operasional Pendidikan (BOS)	20
1. Pengertian BOS	20
2. Satuan Pendidikan Dasar Penerima BOS.....	21
3. Sasaran dan Satuan Biaya BOS	22
4. Kelompok Satuan Pendidikan Dasar Penerima BOS	22
5. Penggunaan BOS	23
6. Organisasi Pelaksana	25
7. Mekanisme Pengiriman Data BOS dan Penyaluran Dana BOS.....	29
8. Program Bantuan Operasional Sekolah Khusus Buku.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34

B. Fokus Penelitian	
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	35
D. Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Instrumen Penelitian	37
G. Analisis Data.....	37
H. Keabsahan Data	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Gambaran Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan	40
1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	40
2. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan	40
3. Potensi Pendidikan Kabupaten Pasuruan.....	42
B. Gambaran Umum SMP Negeri 1 Pandaan	42
1. Riwayat Singkat dan Letak SMP Negeri 1 Pandaan.....	42
2. Keadaan Peserta Didik	44
3. Kondisi Guru dan Tenaga Pelaksana	45
4. Sarana dan Prasarana	47
5. Visi dan Misi SMP Negeri 1 Pandaan	48
6. Kondisi Wali Peserta Didik	49
7. Prestasi Siswa SMP Negeri 1 Pandaan	50
C. Penyajian Data.....	51
1. Penerapan Program Bantuan Operasional Sekolah	51
a. Instansi terkait dalam Penerapan Bantuan Operasional Sekolah.....	51
b. Mekanisme Penyaluran Dana dari Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah	58
c. Mekanisme Penerapan Program BOS yang Dilaksanakan di SMP Negeri 1 Pandaan.....	62
d. Mekanisme monitoring dan pengawasan dari Program Bantuan Operasional Sekolah yang dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota pada Sekolah	66
e. Hasil Penerapan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 1 Pandaan	72
2. Kendala-kendala Penerapan di SMP Negeri 1 Pandaan ..	74
a. Kendala Intern yakni dari hambatan-hambatan yang ada dalam SMP Negeri 1 Pandaan	74
b. Kendala Ekstern yakni hambatan dari luar sekolah. ...	75
D. Pembahasan.....	76
1. Penerapan Program Bantuan Operasional Sekolah	76
a. Instansi terkait dalam penerapan Bantuan Operasional Sekolah	76
b. Mekanisme Penyaluran Dana dari Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah.....	78
c. Mekanisme Penerapan Program BOS yang Dilaksanakan di SMP Negeri 1 Pandaan	79
d. Mekanisme monitoring dan pengawasan dari Program	

Bantuan Operasional Sekolah yang Dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota pada Sekolah 82

e. Hasil Penerapan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 1 Pandaan 82

2. Kendala-kendala Penerapan di SMP Negeri 1 Pandaan ... 84

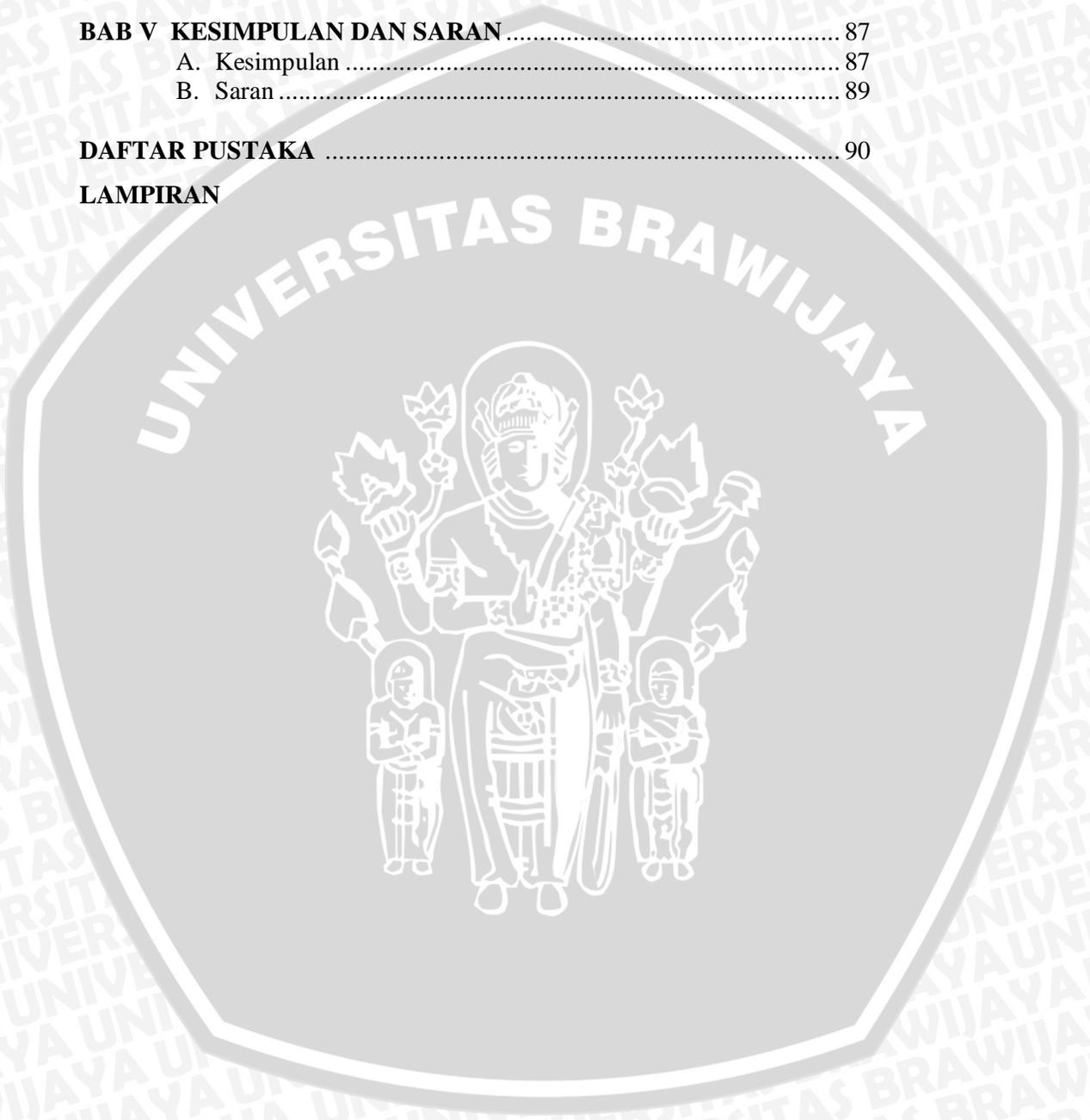
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 87

A. Kesimpulan 87

B. Saran 89

DAFTAR PUSTAKA 90

LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah telah mengeluarkan keputusan yang sangat memberatkan rakyat, yakni keputusan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada tahun 2005 lalu. Dalam satu tahun, pemerintah telah dua kali menaikkan harga BBM pada bulan Maret dan Oktober dengan kenaikan hingga 147%. Kenaikkan harga tersebut terpaksa dilakukan pemerintah karena APBN sudah tidak mampu lagi menanggung subsidi BBM yang terus membengkak seiring dengan meningkatnya harga minyak dunia.

Lagi-lagi rakyat harus menanggung efek dari kenaikan harga BBM tersebut. Jika harga BBM naik dengan sendirinya ongkos transportasi juga ikut naik. Kemudian diteruskan dengan naiknya harga barang dan jasa, sehingga rakyat semakin sulit memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal ini menyebabkan jumlah rakyat miskin semakin meningkat. Menurut data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2006 sebesar 39,05 juta atau 17,75% dari total 222 juta penduduk Indonesia.(www.suarakarya-online.com/news)

Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk menekan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah melalui pemberian dana kompensasi yang berasal dari pengurangan subsidi BBM atau yang dikenal dengan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM). Pemerintah optimis PKPS BBM mampu menahan sebagian penduduk tidak jatuh ke garis kemiskinan. PKPS BBM ini dialokasikan pada empat bidang yaitu, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang infrastruktur pedesaan dan Subisidi Langsung Tunai (SLT).

Salah satu bidang yang menjadi sasaran PKPS BBM adalah bidang pendidikan. Pendidikan merupakan alat yang sangat penting untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Pembangunan bidang pendidikan juga merupakan perwujudan dari salah satu cita-cita nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Seluruh masyarakat Indonesia berhak untuk

memperoleh pendidikan tanpa terkecuali, karena pendidikan adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat.

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia dan proses pembangunan. Pendidikan adalah suatu sarana utama untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas. Oleh karena itu, mutu pendidikan senantiasa perlu ditingkatkan agar selalu dapat mengikuti perkembangan dinamika kehidupan masyarakat. Peningkatan mutu pendidikan yang terus menerus akan diperoleh manusia yang mampu mengikuti dan menyesuaikan diri dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membawa perubahan di hampir semua bidang kehidupan.

Upaya pemerintah untuk memperbaiki kualitas sumber daya ini menjadi sangat mendesak karena mengingat kualitas sumber daya manusia Indonesia masih tergolong rendah jika dibanding negara-negara lain. Berdasar indikator pembangunan manusia yang salah satu ukurannya adalah tingkat pendidikan yang dikembangkan UNDP, data terbaru menempatkan Indonesia berada pada posisi sekitar 40 persen terbawah di antara 174 negara yang dinilai. Rasio untuk pendidikan mencapai 97 persen dan rasio untuk pendidikan menengah 62 persen. Namun, hanya setengah dari anak Indonesia menyelesaikan sekolahnya, sekitar 18 persen anak putus sekolah dasar dan sisanya membantu orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dari indikator ini Indonesia harus bekerja ekstra keras untuk mengejar ketertinggalannya dari negara tetangga agar dapat bersaing di era global. Salah satu caranya adalah melalui peningkatan mutu dan memperluas akses pendidikan untuk masyarakat. (Radar Malang, 4 Maret 2006). Namun, untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan memerlukan biaya yang cukup tinggi. Mutu pendidikan sangat tergantung pada jumlah dana yang dialokasikan untuk sektor pendidikan. Dengan dana yang memadai, otomatis kebutuhan-kebutuhan dapat terpenuhi.

Sesuai dengan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat, pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi setiap warga negaranya. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "setiap warga negara berhak mendapat pendidikan", dan ayat (2) yaitu: "setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya".

Selain itu juga dalam UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib memperoleh pendidikan dasar. Namun, amanat dari undang-undang tersebut masih belum mampu direalisasikan sepenuhnya oleh pemerintah. Saat ini pemerintah hanya mampu memberikan subsidi di bidang pendidikan dan masih belum dapat menggratiskan biaya pendidikan.

Kenyataan yang terjadi sekarang adalah tidak semua masyarakat Indonesia dapat mengakses pendidikan, karena biaya pendidikan semakin melambung tinggi. Tingginya biaya pendidikan ini sebagai salah satu imbas kenaikan BBM. Jika biaya pendidikan mahal maka pendidikan hanya bisa dinikmati oleh masyarakat yang mampu secara finansial saja. Selain itu, pendidikan mahal bisa menjadi biang utama proses pemiskinan, yaitu melalui pintu penarikan biaya yang amat tinggi kepada siswa, yang dapat berupa sumbangan sukarela orang tua siswa, uang buku dan seragam. Beban biaya yang dalam perhitungan ekonomi bertujuan untuk mewujudkan stabilitas makro memiliki efek langsung terhadap lembaga pendidikan, selain karena kebutuhan untuk menyediakan prasarana dan sarana fisik sekolah, juga didorong kebijakan negara yang mau melepaskan tanggung jawab. (Prasetyo, 2004,h.24)

Biaya pendidikan yang mahal menjadi semakin mahal ketika harga BBM dinaikkan. Melalui PKPS BBM bidang pendidikan pemerintah berupaya untuk meringankan beban biaya pendidikan. PKPS BBM Bidang Pendidikan disalurkan dalam dua bentuk yaitu Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Khusus Murid (BKM). PKPS BBM ini diarahkan untuk mendukung penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun yang direncanakan akan berhasil pada tahun ajaran 2008/2009. Selain itu juga untuk membantu siswa dari keluarga tidak mampu agar dapat memperoleh pelayanan pendidikan dan diharapkan seluruh masyarakat dapat menikmati pendidikan yang layak.

Salah satu program dalam PKPS-BBM adalah Program BOS. Program ini diamanatkan untuk mewujudkan pendidikan dasar gratis. Namun dalam implementasinya pemerintah masih kelihatan setengah hati. Setidaknya tergambar dari petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional

(Depdiknas) dan Departemen Agama (Depag) yang masih membuka peluang bagi sekolah untuk tetap melakukan pungutan terhadap orang tua siswa.

Hal ini terjadi umumnya di sekolah-sekolah di daerah perkotaan dimana biaya pendidikan yang harus dikeluarkan jauh lebih besar dari dana BOS, yaitu sekitar Rp.80.000-Rp.90.000,-/bulan. Sedangkan dana BOS sendiri hanya sekitar Rp.20.000,-/bulan untuk siswa SD/MI, dan untuk siswa SMP/MTs sebesar Rp.27.000,-/bulan. Litbang Kompas M Rosalina dan Sultani mengungkapkan,

”keinginan pemerintah untuk menyediakan pendidikan gratis kepada masyarakat tidak bisa diandalkan melalui program BOS. Keadaan ini lalu menimbulkan kesulitan bagi masyarakat dan pihak sekolah. Di satu sisi masyarakat sudah letih karena terus didera oleh berbagai persoalan ekonomi. Masyarakat berharap BOS bisa meringankan biaya pendidikan. Sedangkan pihak sekolah sendiri tidak mungkin menyandarkan seluruh kebutuhannya hanya pada BOS tanpa melibatkan partisipasi masyarakat.”

Jajak pendapat yang dilakukan Kompas menyebutkan bahwa dua dari tiga responden mengatakan bahwa program BOS lebih diarahkan untuk meringankan beban biaya pendidikan daripada sekolah gratis. Hal tersebut wajar karena dana BOS umumnya hanya mampu menutupi 30 persen kebutuhan. (Kompas, 10 Oktober 2006)

Melalui program BOS, pemerintah berupaya agar biaya pendidikan yang semakin mahal ini dapat dijangkau oleh lapisan masyarakat. Jika semua masyarakat bisa mengenyam pendidikan minimal 9 tahun, maka mutu pendidikan juga bisa meningkat. Masyarakat berharap dengan adanya dana BOS ini biaya pendidikan bisa berkurang atau bahkan gratis. Namun, pada kenyataannya hal ini sulit terwujud karena Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja Sekolah (RAPBS) umumnya jauh lebih besar daripada dana BOS. Pihak sekolah pun dengan mudah menarik pungutan karena memang diperbolehkan. Dampaknya adalah banyak sekolah yang meminta dana sumbangan yang masih tergolong tinggi. Selain itu juga kurangnya sosialisasi dana BOS ini pada masyarakat. Selama ini, informasi tentang dana BOS diberikan kepada dinas pendidikan saja sedangkan *stakeholders*, seperti guru dan wali murid sering dabaikan, sehingga para *stakeholders* sulit melakukan pengawasan karena minimnya informasi. Akibatnya kepala sekolah dapat mengalihkan dan menggelapkan dana.

Di samping itu, masih banyak celah-celah yang dimungkinkan untuk terjadi penyimpangan. Dinas Pendidikan Provinsi maupun Kota/Kabupaten, juga sudah melakukan inventarisasi titik-titik rawan. Rata-rata, celah itu ada pada operasional penggunaan bantuan di lapangan. Celah yang pertama adalah belum siapnya sekolah menyusun RAPBS. Seharusnya, draf ini sudah selesai disusun sebelum dana BOS cair. Namun pada kenyataannya, banyak sekolah yang belum menyelesaikan RAPBS meski BOS sudah masuk rekening mereka. Dengan begitu sekolah dapat melakukan manipulasi terhadap selisih antara usulan dalam daftar isian penggunaan dana BOS dengan jumlah siswa yang sebenarnya.

Celah kedua adalah kemungkinan manipulasi jumlah siswa penerima BOS yang dilakukan pihak sekolah. Tujuannya supaya dana BOS yang mereka dapat bisa lebih besar dari jumlah siswa yang menerima bantuan ini. Data yang diperoleh Jawa Pos dari Dinas Pendidikan Surabaya, sekurang-kurangnya ada 12 SMP mengajukan revisi jumlah siswa. Perbandingan revisi data awal dengan data terbaru cukup beragam. Ada yang hanya berbeda satu siswa saja, namun ada juga yang revisinya melebihi batas kewajaran, mencapai 200 lebih siswa. Celah ketiga adalah buruknya database sekolah, terutama di pondok pesantren (Ponpes) yang mempunyai lembaga Madrasah Salafiyah setara SD atau SMP. Mereka ini berada di bawah naungan Departemen Agama (Depag). Kasus terbaru adalah ketika ada sekitar 20 Madrasah Salafiyah dari delapan Ponpes mengaku belum mendapat dana BOS, meski sudah mengajukan ke Depag. Mereka beralasan baru mengajukan dana BOS ketika dana BOS sudah turun. (www.jawapos.co.id)

Kabupaten Pasuruan termasuk salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Timur yang memberi perhatian terhadap pembangunan pendidikan. Kabupaten Pasuruan menempatkan sektor pendidikan ke dalam tiga besar penerima anggaran pembangunan. Selain itu, Kabupaten Pasuruan juga mendukung penuh program pemerintah dalam pendidikan yaitu Program BOS dengan menyalurkan dana BOS ke sekolah-sekolah. Kabupaten Pasuruan menyelenggarakan program BOS sejak program ini dicanangkan oleh pemerintah yaitu tahun 2005.

SMPN 1 Pandaan merupakan salah satu sekolah menengah di kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan yang memperoleh dana BOS. SMP 1 Pandaan memiliki kualitas pendidikan cukup baik yang telah menjadi Sekolah Standar

Nasional. Hal ini terlihat dari banyaknya prestasi akademik dan non akademik yang diraih siswa-siswinya, baik di tingkat kabupaten maupun tingkat propinsi. Dengan adanya program BOS ini diharapkan proses belajar mengajar semakin lancar karena fasilitas pendidikan telah tersedia. Siswa yang tidak mampu tetap dapat melanjutkan sekolah tanpa perlu mengeluarkan biaya, karena dana BOS ini memberikan pendidikan bagi siswa yang tidak mampu.

Namun demikian upaya-upaya pemerintah dalam bidang pendidikan ini di lapangan masih banyak hal-hal yang implikasinya mengalami permasalahan sehingga tidak tepat sasaran, menimbulkan dampak bagi masyarakat dalam hal ini wali murid sebagai sasaran kelompok. Salah satu siswa menyebutkan, "setelah ada BOS, SPP memang jadi turun tapi tetap *aja* masih disuruh bayar-bayar lagi. Saya *kan* kelas tiga, jadi ada intensif belajar bayarnya Rp 450.000,-. Belum LKS-LKS-nya." Bendahara SMP N 1 Pandaan juga menyebutkan, "pada saat awal masuk setiap siswa diwajibkan membayar uang gedung sebesar Rp 500.000,-. Cara pembayarannya dengan mencicil." Program BOS di SMP 1 Pandaan yang dilaksanakan hampir lebih dari dua tahun ini ternyata masih belum dapat menggratiskan biaya sekolah. Biaya SPP per bulan memang menurun namun orang tua siswa masih dibebankan dengan berbagai pungutan, seperti uang gedung, uang LKS (Lembar Kerja Siswa) atau untuk biaya intensif belajar.

Salah satu persoalan di lapangan adalah sering terlambatnya dalam pencairan dana. Ibu Dra. Indriyah Wahyuni, salah satu Dewan Guru di SMP 1 Pandaan menuturkan,

"sepengetahuan saya, persoalan-persoalan yang ada di program BOS adalah soal keterlambatan dana yang kerap terjadi. Dana BOS ini yang seharusnya datang tiap bulan terlambat menjadi tiga bulan, sehingga pihak sekolah mengalami kesulitan untuk mengelola biaya operasional sekolahnya demi kelancaran Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)."

Tim Manajemen BOS Kabupaten Pasuruan, Ibu Hilda Amiliyah juga mengatakan, "di sekolah-sekolah masalah yang kerap terjadi adalah cairnya dana yang beberapa kali terlambat. Dana BOS masih *mandeg* di Bank Jatim, soalnya Bank Jatim belum dapat menyalurkan secara serentak, kadang dana dari Pusat juga turunnya terlambat". Keterlambatan itu terjadi pada awal program BOS, yaitu untuk periode Agustus-Oktober 2005 dana baru bisa dicairkan pada bulan

Oktober. Periode Februari-April 2006, dana dapat dicairkan pada bulan Maret. Menurut Enidah Made Ruswati, MPd, mengatakan, "awalnya banyak sekolah-sekolah di Pasuruan termasuk juga di SMP N 1 Pandaan ini yang kesulitan dengan model pelaporan dan penyusunan dana BOS. Jadi kalau ada salah-salah kerap terjadi". Bendahara SMPN 1 Pandaan menambahkan, "memang mbak, kita masih perlu penyesuaian dengan program BOS ini, meskipun tidak terlalu rumit tapi kan tetap masih perlu adaptasi. Apalagi pada awal program ini dijalankan. Kesulitan-kesulitan itu ada juga." Dengan demikian, persoalan yang kerap terjadi tidak hanya terlambatnya dana turun, namun juga kesulitan penyusunan pelaporan terutama saat awal program BOS.

Berbagai persoalan dalam pelaksanaan program BOS dan adanya pro kontra yang ada di masyarakat ini yang menarik peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul: **"Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di Kabupaten Pasuruan (Studi pada SMP Negeri 1 Pandaan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan)."**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang diuraikan diatas, pertanyaan mendasar dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Pasuruan?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi selama penerapan program (Bantuan Operasional Sekolah) ini?

C. Tujuan

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah di Kabupaten Pasuruan.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi selama penerapan program Bantuan Operasional Sekolah ini.

D. Kontribusi Penelitian

1. Akademis

Sebagai media pengembangan keilmuan khususnya dalam bidang kajian Ilmu Administrasi Publik tentang pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah terhadap pendidikan, dan kendala-kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah tersebut.

2. Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat dan pemerintah tentang prosedur, manfaat, kendala program Bantuan Operasional Sekolah sehingga untuk kedepannya dapat membantu dalam melakukan perbaikan.

E. Kerangka Pemikiran

Penulisan penelitian ini terbagi dalam satu kerangka pemikiran, yaitu:

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan kerangka pemikiran.

Bab II Kajian Pustaka menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan faktor-faktor penelitian seperti pembangunan, pendidikan, peran pemerintah dalam pembangunan pendidikan, Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM), program Bantuan Operasional Sekolah.

Bab III Metode Penelitian membahas tentang metode yang digunakan untuk melakukan penelitian, yang meliputi: jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, analisa data dan keabsahan data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan memuat penyajian data yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian yaitu profil SMP Negeri 1 Pandaan. Selanjutnya, juga akan diuraikan tentang hasil penelitian yang meliputi pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan kendala-kendala yang dihadapi.

Bab V Penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian beserta saran-saran yang diberikan kepada pemerintah berkaitan dengan pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pembangunan

1. Pengertian Pembangunan

Tujuan dari negara-negara berkembang mempunyai komitmen terhadap pembangunan nasional. Pembangunan yang ada di negara-negara berkembang secara umum merupakan proses kegiatan yang terencana dalam upaya pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial dan modernisasi bangsa untuk peningkatan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan masyarakat.

Secara etimologi, istilah pembangunan berasal dari kata bangun yang dalam kata kerja berarti membuat, mendirikan, atau membina. Sedangkan secara ensiklopedik, kata pembangunan telah menjadi bahasa dan konsep yang dikenal oleh dunia.

Menurut Siagian (1992,h.2), pembangunan merupakan usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*national building*).

Sedangkan definisi pembangunan menurut Bryant dan White (2004,h.35) antara lain:

1. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik individu maupun kelompok (*capacity*).
2. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan pemerataan sistem nilai dan kesejahteraan (*equity*).
3. Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya (*empowerment*).
4. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri (*sustainability*).
5. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara yang satu terhadap negara yang lain dengan menciptakan hubungan saling menguntungkan (*simbiosis mutualis*) dan saling menghormati (*interdependensi*).

Pengertian pembangunan itu sendiri harus dilihat secara dinamis, bukan hanya dilihat dari konsep yang statis. Dengan kata lain pembangunan merupakan suatu proses ke arah yang lebih baik dari keadaan yang sebelumnya. Perubahan

juga dapat dirumuskan sebagai perubahan yang lain yang dinilai lebih tinggi. (Katz dalam Suryono, 2004,90).

Sedangkan pembangunan menurut Todaro dan Tjiptoherijanto (1993,182) adalah suatu proses perubahan yang bersifat multidimensional dari struktur masyarakat, perilaku, kelembagaan kemiskinan. Tiga nilai yang menjadi tujuan pembangunan adalah:

1. *Life sustenance*, yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar manusia berupa sandang, pangan kesehatan dan perlindungan terhadap ancaman.
2. *Self-esteem*, yaitu kemampuan untuk menjadi diri sendiri. Dengan kata lain, kemampuan untuk tidak menjadi alat bagi manusia lain atau bangsa lain.
3. *Freedom for survitute*, yaitu kemampuan untuk memilih secara bebas yang disukai dan yang bermanfaat bagi dirinya. Ini menyangkut konsep kemerdekaan pribadi dan demokratis.

Kesimpulannya adalah pembangunan pada dasarnya merupakan konsep yang sangat kompleks pengertiannya. Pembangunan mengandung arti tidak terbatas pada masalah pertumbuhan ekonomi saja tapi juga meliputi keseluruhan aspek kehidupan manusia. Menurut Myrdal dalam Suryono (2004,81) kegiatan pembangunan merupakan suatu proses yang saling terkait, antara proses pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial dan demokrasi politik yang terjadi dalam lingkaran sebab akibat kumulatif. Pada umumnya pembangunan nasional di negara-negara berkembang dipusatkan pada pembangunan ekonomi melalui usaha pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena yang paling dirasakan di negara-negara berkembang adalah keterbelakangan ekonomi terutama masalah kemiskinan. Oleh karena itu, pembangunan di bidang ekonomi diharapkan dapat mendukung tercapainya tujuan atau mendorong perubahan dan pembaharuan dalam bidang kehidupan lainnya.

Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya inti dari pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik dari keadaan yang sebelumnya dengan mengadakan usaha secara maksimal untuk menuju tatanan kehidupan yang lebih baik. Pembangunan tidak hanya

mengandung arti secara fisik melainkan meliputi keseluruhan aspek kehidupan masyarakatnya.

2. Paradigma Pembangunan

Paradigma pembangunan telah mengalami banyak perubahan yang disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Paradigma pembangunan diawali dengan paradigma pertumbuhan (*growth paradigm*) yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan pendapatan nasional. Paradigma ini didukung oleh Teori Rostow tentang tahapan pembangunan yang dialami dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi negara-negara maju, yaitu: (1) tahap masyarakat tradisional; (2) tahap pra kondisi untuk tinggal landas; (3) tahap tinggal landas; (4) tahap menuju kedewasaan dan (5) tahap konsumsi massa tinggi. Namun kenyataannya di negara berkembang, strategi ini tidak menjamin distribusi pendapatan nasional dan harapan efek menetes ke bawah (*trickle down effect*) bahkan tidak menguntungkan kelompok masyarakat bawah (*grass root*). (Suryono, 2004,81)

Ketimpangan distribusi pendapatan, kemiskinan dan pengangguran yang terjadi di negara berkembang tersebut mulai menggeser paradigma pertumbuhan ekonomi menjadi paradigma pertumbuhan dan pemerataan pembangunan (*growth and equity of strategy development*). Paradigma ini lebih diorientasikan pada pengelolaan dan investasi sumber daya manusia dan pembangunan sosial dalam proses pembangunan. Dalam penerapannya paradigma pertumbuhan dan pemerataan pembangunan belum mampu mengurangi ketergantungan negara berkembang terhadap negara maju yang berupa ketergantungan konsumsi, investasi, bantuan dan pinjaman luar negeri.

Untuk mengatasi ketergantungan tersebut Korten dalam Suryono (2004,82) menawarkan konsep pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) yang didukung dengan pendekatan konsep pembangunan manusia (*human development*). Pendekatan ini dititikberatkan pada pembangunan sosial dan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan.

Suryono (2004,82) menjabarkan ciri-ciri pembangunan berkelanjutan antara lain:

1. Pembangunan yang berdimensi pelayanan sosial dan diarahkan pada kelompok sasaran melalui pemenuhan kebutuhan pokok berupa pelayanan di sektor kesehatan dan gizi, sanitasi, pendidikan, dan pendapatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
2. Pembangunan yang ditujukan pada pembangunan sosial seperti mewujudkan keadilan, pemerataan dan peningkatan budaya, serta menciptakan kedamaian;
3. Pembangunan yang diorientasikan pada manusia untuk berbuat (manusia sebagai subyek pembangunan) melalui pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development*) dan meningkatkan pemberdayaan manusia (*promote the empowerment people*).

Menurut Korten arah pembangunan yang berpusat pada manusia bertujuan untuk mendukung pemerataan dan pertumbuhan untuk kelangsungan pembangunan yang bersifat global, baik aspek transformasi, nilai, kelembagaan, teknologi, dan perilaku manusia yang konsisten terhadap kualitas kehidupan sosial dan lingkungannya. Yang perlu diperhatikan dalam paradigma ini adalah pelayanan sosial (*social service*), pembelajaran sosial (*social learning*), pemberdayaan (*empowerment*), kemampuan (*capacity*) dan pembangunan kelembagaan. Hal ini dimaksudkan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, kemandirian, dan etos kerja yang konsisten dalam pembangunan yang berwawasan kualitas manusia. (Suryono, 2004,83)

Dengan demikian pembangunan bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang salah satunya Program Bantuan Operasional Sekolah merupakan wujud dari paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development*). Karena pembangunan bidang pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik dari segi ketrampilan maupun kecerdasan intelektualnya.

B. Pendidikan

1. Pengertian Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu alat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Melalui pendidikan diharapkan mampu menciptakan peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir yang tinggi dan mempunyai ketrampilan yang baik saat terjun ke dunia kerja. Selain itu, juga untuk meningkatkan kemampuan dalam menghadapi tugas di masa depan.

Menurut Tilaar (2000,52) pendidikan merupakan sarana untuk untuk meningkatkan nilai tambah dan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu pendidikan memiliki berbagai fungsi antara lain:

1. Pendidikan sebagai investasi manusia yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini sumber daya manusia dianggap sebagai faktor produksi yang memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Pendidikan mempunyai dampak terhadap peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dapat meningkatkan derajatnya jika memiliki tingkat pendidikan yang relatif tinggi.
3. Pendidikan merupakan wahana untuk membangun dan meningkatkan martabat bangsa. Pendidikan yang bermutu tinggi dapat menciptakan manusia yang memiliki keahlian, ketrampilan dan kecerdasan intelektual yang tinggi pula. Keunggulan yang dimiliki oleh sumber daya manusia tersebut dapat mengantarkan suatu bangsa ke dalam kehidupan yang bermartabat.
4. Pendidikan akan memperbesar peluang terjadinya mobilitas vertikal. Pendidikan merupakan sarana bagi proses mobilitas sosial untuk membentuk sebuah kelas menengah terpelajar yang kritis dan siap memasuki kehidupan modern.
5. Pendidikan dapat memperkuat lembaga-lembaga sosial serta dapat memberi sumbangan yang berarti dalam proses pembentukan masyarakat madani. Masyarakat yang berpendidikan akan bersifat terbuka dan egaliter sehingga akan menstimulasi proses demokratisasi sebagai salah satu karakteristik dari masyarakat madani.

2. Mutu Pendidikan

Mutu berkaitan dengan penilaian terhadap sejauh mana suatu produk dapat memenuhi standar tertentu. Sedangkan mutu pendidikan itu sendiri dikaitkan dengan rumusan acuan atau rujukan yang ada, misalnya kebijakan, proses belajar-mengajar, kurikulum, sarana dan prasarana, serta tenaga pendidik.

Mutu pendidikan tidak saja ditentukan oleh sekolah sebagai lembaga pembelajaran, namun juga disesuaikan dengan apa yang menjadi pandangan dalam masyarakat yang dinamis. Untuk mengimbangi hal itu, maka sekolah diharapkan mampu secara terus menerus meningkatkan mutu lulusannya sesuai dengan perkembangan tuntutan masyarakat menuju mutu pendidikan yang dilandasi tolak ukur norma ideal.

Dalam konteks pendidikan nasional, mutu pendidikan tercermin dari sejauh mana tujuan pendidikan nasional seperti yang dirumuskan dalam Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dapat dicapai. Tujuan tersebut adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan seperti yang tercantum Laporan Komisi Nasional Pendidikan yang dikutip oleh Supriadi (2003, 575) antara lain:

1. Tersedianya guru yang berkualitas dan berkelayakan yang mampu melibatkan siswa dalam proses pembelajaran yang efektif dan mampu pula memanfaatkan fasilitas dan situasi yang ada secara maksimal.
2. Manajemen sekolah dengan pimpinan (kepala sekolah) yang mampu mendayagunakan segala potensi yang tersedia, baik berupa sumber daya manusia maupun sarana fisik serta lingkungan yang diperlukan, termasuk peran serta masyarakat.
3. Manajemen mutu pendidikan. Salah satu penyebab keterpurukan sistem pendidikan nasional kita adalah terjadinya *mismatch* dalam penempatan guru di berbagai jenjang persekolahan (SD, SLTP, SLTA). Manajemen mutu pendidikan yang kondusif, efektif dan efisien harus diikuti pula dengan peningkatan peran serta masyarakat, disamping prakarsa pihak sekolah sendiri dan dukungan pemerintah.
4. Kohesi sosial yang mampu mengakomodasi tumbuh-kembangnya aneka ragam budaya dan adat kebiasaan Indonesia sehingga dapat menunjang pencapaian tujuan pendidikan.

Menurut Depdikbud dalam Khoiriyah (2003, h.38) definisi mutu pendidikan adalah kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap komponen yang berkaitan dengan sekolah, sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma atau standar yang berlaku. Nilai tambah ini diketahui dari input, proses dan output pendidikan.

a. Input pendidikan

Input pendidikan merupakan segala sesuatu yang harus tersedia karena kebutuhan untuk berlangsungnya proses. Sesuatu yang dimaksud berupa sumber daya yang meliputi sumber daya manusia serta sumber daya lainnya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses.

b. Proses pendidikan

Pendidikan berkala mikro (tingkat pendidikan) mengenal proses pendidikan sebagai proses pengambilan keputusan, proses pengelolaan kelembagaan, proses pengelolaan program, proses belajar mengajar dan proses monitoring dan evaluasi.

c. Output pendidikan

Output pendidikan merupakan kinerja sekolah yang berarti bahwa prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses atau perilaku sekolah. Kinerja sekolah dapat diukur dari kualitas, efektifitas, produktifitas, efisiensi, inovasi, kualitas kehidupan kerja dan moral kerjanya.

Output sekolah dikatakan bermutu jika prestasi didik menunjukkan pencapaian tinggi dalam:

- 1) Hasil tes kemampuan akademik berupa nilai ulangan umum, UAN, dan
- 2) Prestasi di bidang lain seperti olah raga, kesenian, dan ketrampilan.

Peningkatan mutu pendidikan merupakan hal yang sampai sekarang masih menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat. Upaya peningkatan mutu pendidikan harus selalu dilakukan karena adanya kebutuhan akan menghasilkan manusia yang bermutu pula, yang mampu mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah membawa perubahan di hampir semua aspek kehidupan.

Pemerintah berupaya meningkatkan mutu pendidikan untuk memperoleh sumber daya manusia yang semakin menguasai keahlian di kemudian hari, dapat bekerja secara profesional, serta mampu menghasilkan karya-karya yang bermutu sehingga sumber daya manusia tersebut dapat memberikan peranan dalam pembangunan bangsa. Pemerintah melakukan investasi dalam bidang pendidikan mencakup pembangunan dan pemeliharaan gedung-gedung sekolah dan ruang kelas, penyediaan peralatan sekolah, pembayaran gaji guru, anggaran untuk program peningkatan kualitas guru, dan lain-lain. (Suryadi, 2002, 189)

C. Peran Pemerintah dalam Pembangunan Pendidikan

Pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam pembangunan pendidikan. Terutama dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas, seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial. Kemudian dalam Batang Tubuh UUD 1945 diamanatkan pentingnya pendidikan bagi seluruh warga negara seperti yang tertuang dalam pasal 28B ayat (1) yaitu bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia, dan pasal 31 ayat (1) yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, menurut teori klasik ilmu politik, politik pemerintah dan ilmu administrasi negara menyebutkan bahwa pada hakikatnya pemerintahan negara menyelenggarakan dua fungsi utama, yaitu:

1. Fungsi Pengaturan

Dasar dari titik tolak pengaturan ialah bahwa negara adalah suatu negara hukum yang intinya berarti bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara semua orang dan semua pihak yang terikat kepada dan harus taat kepada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi dan di negara yang bersangkutan. Jika terdapat pelanggaran akan dikenakan sanksi

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku "tanpa pandang bulu".

2. Fungsi Pelayanan

Fungsi ini berarti bahwa pemerintah negara ikut bertanggung jawab meningkatkan kesejahteraan hidup seluruh rakyatnya, upaya meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat itu dalam bentuk pelayanan aparatur pemerintah kepada para rakyat yang memerlukannya. Itulah sebabnya aparatur pemerintah menyelenggarakan pelayanan umum (*public service*) dan para pegawai negeri dikenal istilah "abdi masyarakat" (*public servants*). (Siagian, 1992, 129)

Fungsi pengaturan dan pelayanan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah bertanggung jawab secara penuh untuk mengatur agar kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan tertib dan aman, selain itu pemerintah wajib untuk meningkatkan kesejahteraan hidup seluruh rakyatnya.

Dengan demikian jelas bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang maksimal di bidang pendidikan. Pelaksanaan tanggung jawab negara dalam pembangunan pendidikan dasar disesuaikan dengan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat Indonesia. Perubahan sosial itu adalah: (1) demokratisasi kehidupan masyarakat Indonesia, (2) proses globalisasi, (3) identitas bangsa dalam rangka kebhinekaan masyarakat Indonesia serta hak asasi manusia, (4) terwujudnya masyarakat belajar (*learning society*) karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. (Tilaar, 2003,158)

Peran pemerintah dalam pembangunan pendidikan terutama pendidikan dasar yang utama dalam hal pembiayaan pendidikan. Karena alokasi dana untuk pembiayaan pendidikan suatu negara sangat menentukan kinerja pendidikan nasional negara bersangkutan. Kinerja pendidikan nasional inilah yang secara langsung maupun tidak langsung membawa kemajuan bagi bangsa dan negara. Meski bukan satu-satunya faktor, pembiayaan pendidikan merupakan faktor dominan yang amat menentukan kinerja pendidikan. Agar di masa depan kinerja pendidikan nasional dapat diperbaiki maka faktor pembiayaan pendidikan harus dibenahi. Untuk mewujudkannya diperlukan komitmen. Para pemimpin bangsa harus memiliki *sense of education* yang memadai dengan komitmen memajukan pendidikan. Komitmen ini diwujudkan antara lain dalam alokasi dana untuk

pembiayaan pendidikan nasional. Komitmen untuk memajukan pendidikan melalui penerapan sistem pembiayaan pendidikan secara konsisten dan inovatif merupakan kunci kemajuan pendidikan pada khususnya dan kemajuan bangsa pada umumnya.

Salah satu bentuk upaya yang dilakukan pemerintah dalam pembiayaan pendidikan yaitu melalui Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program ini merupakan bagian dari Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM).

D. Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM)

Sebagai kompensasi dari pengurangan subsidi BBM, pemerintah mengeluarkan kebijakan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM). PKPS-BBM ini diharapkan dapat menekan jumlah penduduk yang terus membengkak akibat kenaikan harga BBM. Salah satu bidang yang menjadi sasaran dalam program Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) adalah bidang pendidikan.

1. Tujuan Program PKPS-BBM

Program PKPS-BBM ini ditujukan untuk membantu sekolah/madrasah/salafiyah dalam rangka membebaskan iuran siswa namun sekolah tetap dapat mempertahankan mutu pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Selain itu untuk meringankan beban masyarakat untuk biaya pendidikan dalam rangka penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan membantu siswa dari keluarga kurang mampu di tingkat sekolah lanjutan atas agar tetap bersekolah.

2. Kebijakan Program PKPS-BBM

- a. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD/MI/SDLB/Salafiyah dan sekolah keagamaan non-Islam penyelenggara Wajar Dikdas 9 tahun setara SD, negeri dan swasta.
- b. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah dan sekolah keagamaan non-Islam penyelenggara Wajar Dikdas 9 tahun setara SMP, negeri dan swasta.

- c. Bantuan Khusus Murid (BKM) bagi siswa tidak mampu di SMA/SMK/MA/SMLB, bagi negeri dan swasta.

3. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam pelaksanaan PKPS-BBM ini didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku antara lain:

- a. Pasal 4 ayat (1) UUD 1945
- b. Undang-undang No.17 Tahun 1965 tentang Pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan
- c. Undang-undang No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.43 tahun 1999.
- d. Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- e. Undang-undang No.17 Tahun 2000 tentang Bendaharawan Wajib Memungut Pajak Penghasilan.
- f. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah
- g. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- h. Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- i. Undang-undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
- j. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- k. Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah
- l. Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
- m. Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah No.56 tahun 1998
- n. Peraturan Pemerintah No.106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
- o. Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
- p. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan

- q. Kepres No.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea materai & Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenai Bea Materai
- r. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 Tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar
- s. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
- t. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah
- u. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.11 Tahun 2005 tentang Buku Teks Pelajaran
- v. Instruksi Presiden Nomor Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.

B. Program Bantuan Operasional Pendidikan (BOS)

1. Pengertian BOS

Agar pelaksanaan program BOS dan masyarakat memahami program BOS dengan benar, maka berikut ini diuraikan tentang biaya pendidikan dan terminologi program BOS:

- a. Biaya satuan pendidikan (BSP) adalah besarnya biaya yang diperlukan rata-rata tiap siswa tiap tahun, sehingga mampu menunjang proses belajar mengajar sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan. Dari cara penggunaannya, BSP dibedakan menjadi BSP Investasi dan BSP Operasional.
- b. BSP Investasi adalah biaya yang dikeluarkan per siswa per tahun untuk menyediakan sumber daya yang tidak habis pakai yang digunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun, misalnya untuk pengadaan tanah, bangunan, buku, alat peraga, media, perabot dan alat kantor.
- c. BSP Operasional adalah biaya yang dikeluarkan per siswa per tahun untuk menyediakan sumber daya pendidikan yang habis pakai yang digunakan satu tahun atau kurang. BSP Operasional mencakup biaya personil dan biaya non personil. Biaya personil meliputi biaya untuk kesejahteraan honor Kelebihan Jam Mengajar (KJM), guru tidak tetap (GTT), pegawai tidak tetap (PTT), uang lembur dan pengembangan profesi guru (Diklat) Guru, Musyawarah

Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Kelompok Kerja Guru (KKG), dll.

- d. Bantuan non personil adalah biaya untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, evaluasi/penilaian, perawatan/pemeliharaan, daya dan jasa, pembinaan kesiswaan, rumah tangga sekolah dan supervisi.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimaksud dalam PKPS-BBM Bidang Pendidikan ini secara konsep mencakup komponen untuk biaya operasional hasil studi Balitbang Depdiknas. Namun karena biaya satuan yang digunakan adalah rata-rata nasional maka penggunaan BOS dimungkinkan untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personil dan biaya investasi. Perlu ditegaskan bahwa prioritas utama BOS adalah untuk operasional non personil bagi sekolah, bukan biaya kesejahteraan guru dan bukan biaya investasi. Oleh karena keterbatasan dana BOS dari pemerintah pusat, maka biaya untuk investasi sekolah dan kesejahteraan guru dibiayai dari sumber lainnya, dengan prioritas utama dari sumber pemerintah daerah dan selanjutnya dari partisipasi masyarakat.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk membebaskan semua atau sebagian dari biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh orang tua siswa SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB baik negeri maupun swasta serta SD Salafiyah dan SMP Salafiyah agar semua dapat memperoleh pendidikan dasar sampai tamat.

2. Satuan Pendidikan Dasar Penerima BOS

- a. Semua sekolah berhak memperoleh BOS. Sekolah yang bersedia menerima BOS harus:
- 1) mempunyai surat ijin operasional/kelembagaan dari Pemerintah Daerah atau Kantor Departemen Agama,
 - 2) menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan,
 - 3) bersedia mengikuti ketentuan yang tertuang dalam buku petunjuk pelaksanaan.
- b. Sekolah kaya, mapan dan mampu secara ekonomi yang saat ini memiliki anggaran pendapatan yang lebih besar dari dana BOS memiliki hak untuk tidak menerima BOS tersebut, sehingga lembaga yang bersangkutan tidak

memiliki kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang tertuang dalam buku petunjuk pelaksanaan.

- c. Program Kejar Paket A, Paket B dan SMP Terbuka tidak termasuk sasaran dari PKPS-BBM ini, karena ketiga program tersebut merupakan pendidikan dasar gratis yang dibiayai secara penuh oleh pemerintah.

3. Sasaran dan Satuan Biaya BOS

Sasaran jumlah satuan pendidikan dasar seluruh Indonesia dan satuan biaya per siswa/tahun yang menjadi dasar perhitungan jumlah BOS yang akan diterima oleh setiap sekolah/madrasah/salafiyah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Sasaran dan Satuan Biaya BOS

Satuan Pendidikan	Sasaran dan Satuan Biaya		Satuan Biaya Juli-Desember 2005(Rp/Siswa)
	Siswa	Rp/Siswa/Tahun	
BOS-SD/MI/SDLB	28.779.709	235.000,-	117.500,-/6 bln
BOS-SMP/MTs/SMPLB	10.625.816	324.500,-	162.250,-/6 bln
BOS-SD Salafiyah	108.177	235.000,-	117.500,-/6 bln
BOS-SMP Salafiyah	114.433	324.500,-	162.250,-/6 bln

Sumber: www.kalbar.go.id

4. Kelompok Satuan Pendidikan Dasar Penerima BOS

Sekolah yang telah menyatakan menerima BOS dibagi menjadi dua kelompok yang memiliki hak dan kewajiban antara lain:

- a. Satuan pendidikan dasar dengan anggaran pendapatan sama atau lebih kecil dari BOS.
 - 1) Bagi sekolah yang selama ini jumlah anggaran pendapatan tertuang dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) sama atau lebih kecil dari dana BOS, maka sekolah harus membebaskan semua bentuk pungutan/iuran kepada seluruh siswa (sekolah gratis).
 - 2) Sekolah penerima BOS juga diwajibkan untuk memfasilitasi siswa tidak mampu/miskin yang mengalami kesulitan transportasi dari dan ke sekolah.
- b. Satuan pendidikan dasar dengan anggaran lebih besar dari BOS.

Bagi sekolah yang memiliki pendapatan RAPBS lebih besar dari BOS, maka sekolah dapat memungut tambahan biaya sekolah, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Bagi sekolah yang terdapat siswa miskin. Sekolah diwajibkan membebaskan pungutan/sumbangan/iuran siswa miskin yang ada di sekolah tersebut. Sisa dana BOS digunakan untuk mensubsidi siswa lain sehingga sumbangan/pungutan/iuran bulanan siswa lainnya lebih kecil dari sumbangan sebelumnya.
- 2) Bagi sekolah yang tidak ada siswa miskin. Bila sekolah dengan tipe ini bersedia menerima dana BOS maka dana digunakan untuk mensubsidi seluruh siswa, sehingga dapat mengurangi iuran yang disebabkan kepada orang tua siswa, minimum senilai dana bos yang diterima sekolah.

5. Penggunaan BOS

Dana penggunaan dana BOS ini harus didasarkan pada kesepakatan bersama antara pihak sekolah dengan Komite Sekolah/Madrasah. Dana BOS diperuntukkan bagi kelancaran kegiatan belajar mengajar seperti uang formulir pendaftaran, buku pelajaran, ujian sekolah dan kegiatan operasional sekolah lainnya. Akan tetapi, dana BOS ini tidak diperkenankan untuk disimpan dalam jangka waktu lama, dipinjamkan pada pihak lain dan bagi kepentingan-kepentingan lain yang tidak berkaitan dengan proses pembelajaran.

a. BOS digunakan untuk:

1. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru: biaya pendaftaran penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut.
2. Pembelian buku teks (di luar buku yang telah dibeli dari dana BOS) dan buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan.
3. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah dan sejenisnya.

4. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah/madrasah/ponpes dan laporan hasil belajar siswa.
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai, misalnya buku tulis, kapur tulis, pensil, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran, kopi, teh, dan gula untuk kebutuhan sehari-hari sekolah/madrasah/ponpes.
6. Pembiayaan perawatan sekolah/madrasah/ponpes: pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebeler, perbaikan sanitasi sekolah dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.
7. Pembiayaan langganan daya dan jasa: listrik, air, telepon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah/madrasah/ponpes.
8. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Tambahan insentif rutin bagi kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah.
9. Kegiatan peningkatan mutu pendidikan, misalnya MGMP, pelatihan guru dan peningkatan kreativitas guru.
10. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah/madrasah/ponpes.
11. Pembiayaan pengelolaan BOS: alat tulis kantor (ATK), penggandaan, surat ,menyurat dan penyusunan laporan.
12. Khusus untuk SD Salafiyah dan SMP Salafiyah, dana BOS juga diperkenankan untuk biaya asrama/pondokan dan membeli peralatan ibadah.
13. Bila seluruh komponen diatas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran dan mebeler sekolah/madrasah/ponpes.

- b. BOS tidak boleh digunakan untuk:
1. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan
 2. Dipinjam kepada pihak lain
 3. Membayar bonus, transportasi, pakaian atau makanan yang tidak berkaitan dengan kepentingan murid
 4. Membangun gedung/ruangan baru
 5. Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran
 6. Menanamkan saham

Adapun rincian komponen pembiayaan dana BOS ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2
Komponen Biaya

No.	Komponen Biaya	Siswa/Tahun/Rp.	
		SD/MI	SMP/MTS
1.	Alat Tulis	58.000	81.500
2.	Daya dan Jasa	53.000	70.500
3.	Perbaikan dan Pemeliharaan	42.000	62.500
4.	Pembinaan Siswa	21.000	32.000
5.	Pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pelaporan	9.500	11.750
6.	Peralatan	12.000	6 16.250
7.	Bahan Praktek	9.000	13.000
8.	Dll (rapat pengurus, kegiatan komite, dll)	30.000	37.000
9.	Total	235.000	324.500

Sumber: www.antikorupsi.org/docs/bos05.pdf

6. Organisasi Pelaksana

- a. Tingkat Pusat
 - 1) Pelindung
 - a) Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat
 - b) Ketua Bappenas
 - c) Menteri Pendidikan Nasional
 - d) Menteri Agama

- e) Menteri Keuangan
- 2) Penanggungjawab
 - a) Dirjen Dikdasmen Diknas
 - b) Dirjen Kelembagaan Agama Depag
- 3) Pelaksana

Tim PKPS-BBM di tingkat pusat yang terdiri dari unsur Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama:

- a. Ketua Satker PKPS_BBM (dari Depdiknas)
- b. Bendahara (dari Depdiknas)
- c. Seksi data (1 dari Diknas dan 1 dari Depag)
- d. Seksi BKM (1 dari Depdiknas dan 1 dari Depag)
- e. Seksi BOS SD/MI/salafiyah setara SD (2 dari Depdiknas dan 2 dari Depag)

Tugas dan tanggung jawab Tim PKPS-BBM Pusat:

1. Menyusun rencana program
 2. Menetapkan alokasi dana dan sasaran tiap propinsi
 3. Bersama-sama Tim PKPS-BBM Propinsi menetapkan alokasi tiap kabupaten/kota
 4. Merencanakan dan melakukan sosialisasi program
 5. Mempersiapkan dan melatih Tim PKPS-BBM Propinsi
 6. Melakukan penyusunan, penggandaan dan penyebaran buku petunjuk pelaksanaan program
 7. Menyusun standarisasi sistem database
 8. Menyalurkan dana operasional dan monitoring ke Tim PKPS-BBM
 9. Merencanakan dan melakukan monitoring dan evaluasi ke daerah
 10. Memberikan pelayanan dan pengaduan masyarakat
 11. Memonitor perkembangan penyelesaian penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Tim PKPS-BBM Propinsi atau Tim PKPS-BBM Kab/Kota.
- b. Tingkat Propinsi
 - 1) Pelindung : Gubernur
 - 2) Pengarah : Ketua Bappeda

- 3) Penanggungjawab :
 - a) Kepala Dinas Pendidikan Propinsi
 - b) Kepala Kantor Wilayah Depag
- 4) Pelaksana : Tim PKPS-BBM di tingkat Propinsi yang terdiri dari unsur Dinas Pendidikan dan Departemen Agama.
 - a) Ketua Satker PKPS-BBM (dari Dinas Pendidikan Propinsi)
 - b) Bendahara
 - c) Seksi pendataan(1 dari Subdin Program Dinas Pendidikan dan 1 dari Kanwil Depag)
 - d) Seksi BKM (1 dari Subdin yang menangani SMA/SMK dan 1 dari Kanwil Depag)
 - e) Seksi BOS setara SD (1 dari Subdin yang menangani SD Dinas Pendidikan dan 1 dari Kanwil Depag)
 - f) Seksi BOS setara SMP (1 dari Subdin yang menangani SMP Dinas Pendidikan dan 1 dari Kanwil Depag)
 - g) Seksi monitoring dan penyelesaian masalah (1 dari Dinas Pendidikan dan 1 dari Kanwil Depag)
 - h) Seksi publikasi (1 dari Dinas Pendidikan dan 1 dari Kanwil Depag)

Tugas dan Tanggung jawab Tim PKPS-BBM Propinsi:

1. Bersama-sama Tim PKPS-BBM Pusat menetapkan alokasi bantuan tiap kabupaten/kota
2. Mempersiapkan sekretariat dan perlengkapannya di propinsi
3. Mempersiapkan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) sesuai dengan dana dan kegiatan yang telah ditetapkan
4. Merencanakan dan melakukan sosialisasi program di tingkat propinsi
5. Mempersiapkan dan melatih Tim PKPS-BBM Kab/Kota
6. Melakukan pendataan penerima dana bantuan sesuai standar database yang telah dipersiapkan oleh Tim PKPS-BBM Propinsi
7. Menyalurkan dana PKPS-BBM ke sekolah penerima BOS dan siswa penerima BKM

8. Berkoordinasi dengan Kantor Pos/Bank Pemerintah/Bank Daerah dan Tim PKPS-BBM Kab/Kota dalam penyaluran dana
 9. Merencanakan dan melakukan monitoring dan evaluasi ke kabupaten/kota
 10. Memberikan pelayanan dan pengaduan masyarakat
 11. Bertanggungjawab terhadap kasus penyimpangan penggunaan dana bantuan di tingkat propinsi
 12. Melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan kepada Tim PKPS-BBM Pusat dan instansi terkait
- c. Tingkat Kabupaten
- 1) Pelindung : Bupati/Walikota
 - 2) Pengarah : Ketua Bappeda Kab/Kota
 - 3) Penanggungjawab :
 - a) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
 - b) Kepala Kantor Departemen Agama
 - 4) Pelaksana : Tim PKPS-BBM yang terdiri dari unsur Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota
 - a) Manager PKPS-BBM (dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota)
 - b) Seksi pendataan (1 dari Subdin yang menangani SMA/SMK Dinas Pendidikan Kab/Kota, 1 dari Kantor Depag)
 - c) Seksi BOS setara SD (1 dari Subdin yang menangani SD Dinas Pendidikan Kab/Kota, 1 dari Kantor Depag)
 - d) Seksi BOS setara SMP (1 dari Subdin yang menangani SMP Dinas Pendidikan Kab/Kota, 1 dari Kantor Depag)
 - e) Seksi monitoring & evaluasi dan penyelesaian masalah (1 dari Dinas Pendidikan dan 1 dari Kantor Depag)

Tugas dan Tanggungjawab Tim PKPS-BBM Kabupaten/Kota:

1. Menetapkan alokasi BOS dan BKM untuk setiap sekolah sesuai dengan alokasi/kuota
2. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada sekolah penerima
3. Melakukan pendataan dalam sistem database yang sudah ditentukan

4. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Propinsi dan Kantor Pos/Bank Pemerintah/Bank Daerah yang ditunjuk, serta dengan sekolah dalam rangka penyaluran dana
 5. Mengumumkan nama sekolah serta besar dana yang diterima
 6. Merencanakan dan melakukan monitoring dan evaluasi program PKPS-BBM Bidang Pendidikan
 7. Melaporkan pelaksanaan program kepada Tim PKPS-BBM Propinsi
 8. Mengumpulkan data dan laporan dari sekolah serta Kantor Pos/Bank Pemerintah/Bank Daerah yang ditunjuk sebagai penyalur dana
 9. Memberikan pelayanan dan pengaduan masyarakat
 10. Bertanggungjawab terhadap kasus penyimpangan penggunaan dana bantuan di tingkat kabupaten/kota
 11. Melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan kepada Tim PKPS-BBM Propinsi dan instansi terkait.
- d. Tingkat Sekolah
- 1) Penanggungjawab
 - a) Kepala sekolah/madrasah/penanggungjawab program Wajar Diknas Salafiyah
 - b) Kepala sekolah/madrasah menunjuk guru/bendahara sekolah untuk mengelola dana PKPS-BBM di tingkat sekolah.
 - 2) Tugas dan tanggung jawab sekolah
 - a) Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan
 - b) Bertanggung jawab terhadap segala penyimpangan dana yang ada di sekolah
 - c) Memberikan pelayan dan penanganan masyarakat
 - d) Melaporkan data penggunaan dana PKPS-BBM kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

7. Mekanisme Alokasi Dana BOS dan Penyaluran Dana BOS

a. Alokasi Dana BOS

Mekanisme penyaluran dana BOS mulai dari Pusat samapai sekolah yang berhak menerima akan melalui bagan alur di bawah ini:

Bagan 1

Alur Pengiriman Data BOS



Sumber: Buku Pedoman BOS tahun 2005

Pengalokasian dana BOS melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

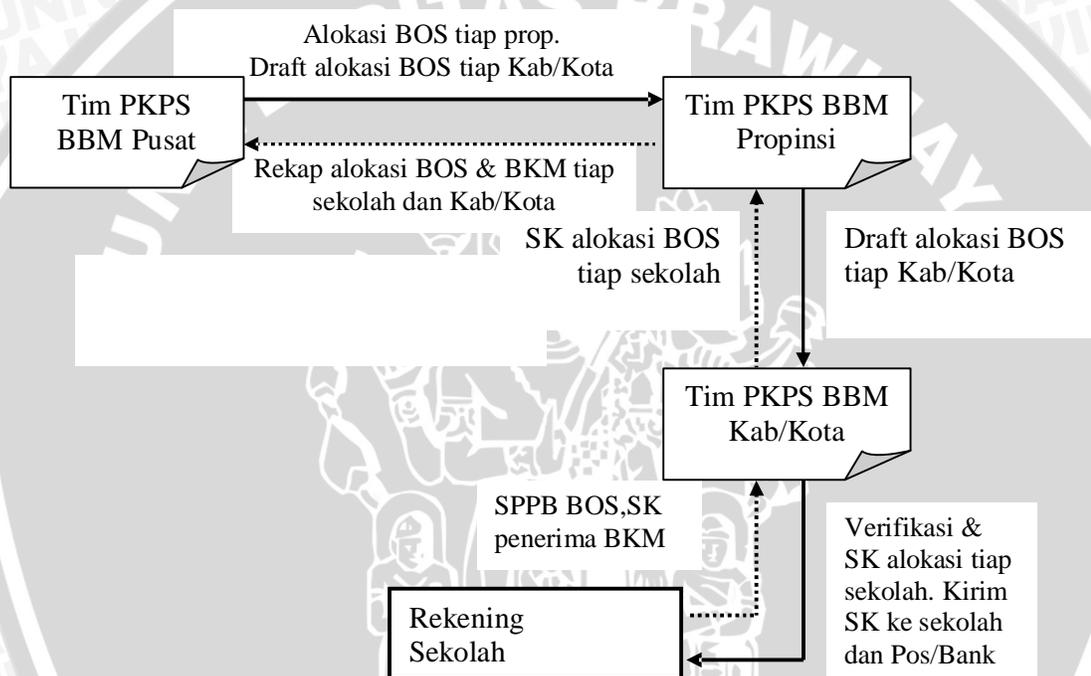
1. Tim PKPS-BBM Pusat mengumpulkan data jumlah siswa tiap sekolah melalui Tim PKPS-BBM Propinsi dan Kabupaten/Kota, kemudian menetapkan alokasi dana BOS tiap Propinsi.
2. Atas dasar data jumlah siswa tiap sekolah, Tim PKPS-BBM Pusat membuat alokasi dana BOS tiap propinsi yang dituangkan dalam DIPA Propinsi.
3. Tim PKPS-BBM Propinsi diharapkan melakukan verifikasi ulang data jumlah siswa tiap sekolah sebagai dasar dalam menetapkan alokasi di tiap sekolah.
4. Tim PKPS-BBM Kabupaten/Kota menetapkan sekolah yang bersedia menerima BOS melalui Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota, Kepala Kandepag Kab/Kota, dan Dewan Pendidikan dengan dilampiri daftar nama sekolah dan besar dana bantuan

yang diterima. Sekolah yang bersedia menerima BOS harus menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB).

5. Tim PKPS-BBM Kab/Kota mengirimkan SK Alokasi BOS dengan melampikan daftar sekolah ke Tim PKPS-BBM Propinsi, tembusan ke Pos/Bank dan sekolah penerima BOS.

b. Mekanisme Penyaluran Dana BOS

Bagan 2
Mekanisme Penyaluran Dana BOS



Penyaluran dana dilaksanakan oleh Tim PKPS-BBM tingkat propinsi melalui PT. Pos/Bank pemerintah, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Setker PKPS-BBM Propinsi mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dana BOS kepada Dinas Pendidikan Propinsi.
2. Dinas Pendidikan Propinsi setelah melakukan verifikasi atas SPP-LS dimaksud menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS).
3. Dinas Pendidikan Propinsi selanjutnya mengirimkan SPM-LS dimaksud kepada KPPN Propinsi.

4. KPPN Propinsi melakukan verifikasi terhadap SPM-LS untuk selanjutnya menerbitkan SP2D yang membebani rekening Kas Negara.
5. Selanjutnya dana BOS disalurkan ke sekolah penerima BOS melalui Kantor Pos/Bank Pemerintah yang ditunjuk sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendidikan Propinsi dan Lembaga Penyalur (Pos/Bank).
6. Tim PKPS-BBM Kabupaten/Kota dan Sekolah harus mengecek kesesuaian dana yang disalurkan oleh Kantor Pos/Bank dengan alokasi BOS yang ditetapkan oleh Tim PKPS-BBM Kabupaten/Kota. Jika terdapat perbedaan dalam jumlah dana yang diterima, maka perbedaan tersebut harus segera dilaporkan kepada Kantor Pos/Bank bersangkutan dan Tim PKPS-BBM Propinsi untuk diselesaikan lebih lanjut.

8. Program Bantuan Operasional Sekolah Khusus Buku

Program Bantuan Operasional Sekolah juga diwujudkan dalam bentuk bantuan buku atau yang dikenal dengan BOS Buku. Program ini mulai diluncurkan pada saat Hari Pendidikan Nasional 20 Mei 2006, dan menelan dana Rp. 800 miliar yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana tersebut diberikan dengan cara *block grand* yaitu langsung ke sekolah-sekolah untuk pengadaan buku teks pelajaran wajib seperti matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS tapi tidak termasuk buku pengayaan. Program BOS Buku ini ditujukan untuk sekolah-sekolah SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB di 33 propinsi dengan harga Rp. 20.000,- per buku. (Pena Pendidikan, Juli 2006)

Mekanisme penggunaan dana BOS Buku ini melalui beberapa tahap. Tahap pertama, sekolah menerima transfer dana yang disesuaikan dengan jumlah siswa di sekolah tersebut. Setelah itu, kepala sekolah harus mengadakan rapat bersama komite sekolah untuk menentukan buku yang akan dibeli. Bila sudah ada kesepakatan antara kepala sekolah dengan komite, kepala sekolah harus membuat berita cara tentang pembelian buku tersebut.

Berita acara tersebut harus transparan agar dapat dipantau oleh semua pihak, baik pihak masyarakat, dinas pendidikan setempat, manajer BOS Kabupaten/Kota, dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi penggunaan dana tersebut.

Buku yang harus dibeli, sesuai dengan aturan yang tertuang dalam buku Panduan BOS dan BOS Buku. Sekolah diharuskan membeli buku teks pelajaran sesuai peraturan Mendiknas No.11 Tahun 2005 tentang buku teks pelajaran. Dengan spesifikasi buku mengikuti standar yang dikeluarkan Badan Standar Nasional (BNSP) atau Permen No.26 Tahun 2005 tentang Kelayakan Buku. Untuk buku SMP bahasa Indonesia, BNSP sudah mengeluarkan sebanyak 45 penerbit, matematika 44 penerbit, dan bahasa Inggris 22 penerbit. Jika sekolah mendapat diskon dari penerbit, maka dana yang tersisa harus digunakan untuk membeli kebutuhan buku yang lain. (<http://groups.yahoo.com>, diakses tanggal 25 Februari 2007)



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian terhadap suatu fenomena yang terjadi di masyarakat, para peneliti dapat memilih satu alternatif dari berbagai macam metodologi penelitian yang ada. Metode penelitian ini dapat digunakan dalam pengumpulan data dan penemuan data, analisis data serta interpretasi data sehingga dapat dikatakan bahwa metode penelitian memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah kegiatan untuk memudahkan peneliti mencapai tujuan.

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Zuriyah (2000:10) penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memaparkan gejala-gejala, fakta-fakta, sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Sedangkan definisi penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2005,h.1):

“Metode penelitian adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.”

Dengan menggunakan metode penelitian ini, peneliti ini berusaha untuk menggambarkan bagaimana penerapan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang ada di SMP Negeri 1 Pandaan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya di SMP Negeri 1 Pandaan.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk menilai bagaimana penerapan dari program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Latar belakang penulis mengfokuskan pada penerapannya sehingga nantinya dapat diketahui apakah penerapan dari program BOS ini berhasil atau tidak.

Untuk itu penulis memberikan batasan fokus penelitian yaitu:

1. Penerapan Program Bantuan Operasional Sekolah
 - a. Instansi terkait dalam penerapan program Bantuan Operasional Sekolah.

- b. Mekanisme penyaluran dana dari program Bantuan Operasional Sekolah.
 - c. Mekanisme penerapan program BOS yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Pandaan.
 - d. Mekanisme monitoring dan pengawasan dari program Bantuan Operasional Sekolah yang dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota pada sekolah.
 - e. Hasil pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 1 Pandaan
2. Kendala-kendala
- a. Kendala intern yakni hambatan-hambatan yang ada dalam pengelolaan dana di SMP Negeri 1 Pandaan.
 - b. Kendala ekstern yakni hambatan dari luar sekolah.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah letak dimana penelitian akan dilakukan untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini lokasi yang diambil adalah SMP Negeri 1 Pandaan karena merupakan salah satu sekolah yang menerima dana BOS yang memiliki prestasi akademik non akademik baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi.

Situs penelitian adalah tempat atau peristiwa yang didalamnya peneliti dapat mengamati keadaan sebenarnya dari obyek penelitian. Berkaitan dengan hal tersebut yang menjadi situs penelitian adalah

1. Kantor Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pandaan.
2. Kantor Tata Usaha SMP Negeri 1 Pandaan
3. Kantor Sub Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan

D. Sumber Data

Lofland and Lofland (Moleong, 2004) mengemukakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan dan lain-lain.

1. Informan

Informan awal dipilih secara purposif. Hal ini dimaksudkan untuk memilih informan yang benar-benar relevan dan kompeten dengan masalah penelitian sehingga data yang diperoleh digunakan untuk membangun teori. Sedangkan informan selanjutnya diminta kepada informan awal untuk menunjukkan orang lain yang dapat memberikan informasi dan kemudian informan ini diminta pula untuk menunjuk orang lain yang dapat memberikan informasi, dan seterusnya. Cara ini lazim disebut “*snow ball sampling*” yang dilakukan secara serial atau berurutan. Dalam penelitian yang dijadikan sebagai informan adalah Kasubag Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan, Staf Subag Perencanaan Seksi Bantuan Operasional Sekolah, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pandaan, Bendahara SMP Negeri 1 Pandaan, Guru SMP Negeri 1 Pandaan

2. Peristiwa

Berbagai peristiwa atau situasi sosial yang diobservasi dan berkaitan dengan masalah atau fokus penelitian. Peristiwa-peristiwa yang diobservasi dikemukakan pada teknik pengumpulan data.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Wawancara, yaitu cara memperoleh data di lapangan melalui tanya jawab secara langsung. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan Kasubag Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan, Staf Subag Perencanaan Seksi Bantuan Operasional Sekolah, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pandaan, Bendahara SMP Negeri 1 Pandaan, Guru SMP Negeri 1 Pandaan, dan Siswa SMP 1 Pandaan.
2. Observasi adalah cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung dan melihat dari dekat keadaan obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini observasi dilakukan terhadap kondisi SMP Negeri 1 Pandaan dan kondisi Subag Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan.

3. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan mencatat dan memanfaatkan data yang ada di instansi yang berkaitan dengan penelitian yang berupa dokumen.

4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengumpulkan data-data penelitian. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument penelitian atau alat penelitian adalah peneliti sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif tiap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. (Sugiyono, 2005, 59). Instrumen penelitian ini adalah:

1. Peneliti sendiri, dimana peneliti yang dapat menangkap setiap fenomena yang terjadi terkait dengan apa yang diteliti.
2. Pedoman wawancara, dipakai sebagai kerangka atau dasar dalam wawancara atau mengajukan pertanyaan dengan narasumber yang terkait dengan penelitian.
3. Catatan lapangan, yaitu catatan di lapangan untuk mencatat hasil wawancara dan pengamatan selama melakukan penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, seperti yang diungkapkan Sugiyono (2005,91) berlangsung pada saat pengumpulan data, dan setelah peneliti melakukan pengumpulan data. Analisa data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengelompokkan data ke dalam pola, dengan memilih data dan kemudian membuat suatu kesimpulan sehingga dapat dimengerti oleh diri sendiri ataupun orang lain.

Tahapan analisis data dalam penelitian ini menurut Milles and Huberman dalam Sugiyono (2005, 91-99) antara lain sebagai berikut:

1. Reduksi data (*data reduction*) adalah proses pemilihan, pemberian fokus, penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data. Kegiatan reduksi data ini

bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian data (*data display*) adalah susunan informasi yang terorganisir, yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data yang paling umum adalah teks uraian, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sebagainya.
3. Penarikan kesimpulan (*verification*). Kesimpulan akhir baru ditarik setelah tidak ditemukan informasi lagi berkaitan dengan kasus yang diteliti. Kemudian kesimpulan yang telah ditarik akan diverifikasi, baik dengan kerangka berpikir peneliti maupun dengan catatan lapangan yang ada, sehingga tercapai konsensus pada tingkat optimal pada peneliti dengan sumber-sumber informasi dengan kolega peneliti, yang akhirnya akan diperoleh validitas dan akuratisasinya.

6. Keabsahan Data

Keabsahan data diperlukan untuk mengecek hasil penelitian sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Tingkat kepercayaan suatu penelitian akan ditentukan oleh standar apa yang dipakai. Sugiyono (2005, 120-131) menyebutkan setidaknya terdapat empat kriteria yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data, yaitu:

1. Kredibilitas, merupakan kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif. Pengukuran kredibilitas ini dilakukan antara lain dengan:
 - a) Memperpanjang keikutsertaan
Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data, perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data dikumpulkan. Peneliti dalam memakan waktu kurang lebih 2 bulan.
 - b) Melakukan pengamatan langsung secara intensif
Ketekunan pengamatan dimaksudkan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang relevan dengan persoalan atau isu-isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

c) Melakukan *peer debriefing*

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan berbagai masukan baik berupa kritik dan saran dari peneliti lain yang diperoleh melalui diskusi.

d) Triangulasi

Teknik triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu.

2. Transferability

Hasil penelitian ini dapat dilakukan transferability agar pembaca dapat memahami hasil penelitian sehingga dimungkinkan untuk menerapkannya, maka peneliti memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya.

3. Depenability

Aktivitas peneliti ini berjalan karena juga telah diaudit oleh para pembimbing, mulai dari menentukan masalah, menentukan sumber data, melakukan analisis data dan sampai membuat kesimpulan.

4. Konfirmability

Konfirmability berkaitan dengan menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dicapai oleh peneliti.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan

1. Kedudukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan

Kedudukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan adalah sebagai perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Pasuruan di bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan, membina, dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan.

2. Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan

Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan adalah terwujudnya masyarakat yang berpendidikan, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur serta memiliki kesadaran dan kemampuan untuk berperan aktif dalam pembangunan.

Sedangkan misi yang ingin diwujudkan adalah meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dengan memperoleh layanan pendidikan dengan meningkatkan fasilitas pendidikan melalui pembangunan, pengadaan dan pemeliharaan bangunan serta sarana pendukung lainnya.

Untuk mencapai visi tersebut, telah ditetapkan tujuan, sasaran dan strategi serta kebijakan yang akan digunakan dalam pencapaiannya, yaitu:

1. Tujuan

Tujuan pemerintah Kabupaten Pasuruan yang selaras dengan fungsi/bidang kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan adalah pelayanan publik sesuai dengan keempat misinya, yaitu:

- a. Misi pertama adalah meningkatkan pemerataan, perluasan mutu pendidikan melalui pembinaan dan pengembangan jalur formal, non formal, manajemen sekolah serta peningkatan peran serta masyarakat untuk tercapainya program Wajar Diknas 9 tahun, meningkatkan

kualitas dan kuantitas, tersedianya tenaga pendidikan untuk memenuhi kualitas dan kuantitas, meningkatkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan formal serta berkembangnya pendidikan non formal.

- b. Misi kedua adalah mengembangkan seni budaya daerah melalui pemeliharaan dan pengawasan cagar budaya, berperan aktif dalam festival serta pekan budaya.
- c. Misi ketiga adalah mewujudkan generasi muda yang produktif dan mandiri serta berperan aktif dalam pembangunan melalui program pembinaan generasi muda.
- d. Misi keempat yaitu meningkatkan fasilitas pendidikan melalui pengadaan dan pemeliharaan bangunan serta sarana pendukung lainnya.

2. Sasaran

Sasaran pemerintah kabupaten yang selaras dengan fungsi/bidang kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan adalah:

- a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan kesempatan
- b. menurunnya persentase warga yang buta huruf
- c. meningkatnya aktivitas pemuda
- d. berkembangnya seni budaya daerah.

3. Strategi

Strategi yang tepat merupakan syarat utama untuk mencapai tujuan dan sasaran, hal tersebut memerlukan dukungan data yang relevan, analisis lingkungan internal dan eksternal yang jujur dan kejelasan dalam menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan dalam uraian berbagai kebijakan program dan kegiatan.

3. Potensi Pendidikan Kabupaten Pasuruan

Kabupaten Pasuruan memiliki 1040 SD/MI dengan jumlah siswa sebanyak 108.062 siswa dan 214 SMP/MTs yang memiliki siswa 51.467 siswa yang tersebar di 24 kecamatan. Berdasarkan Profil Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan, jumlah SD/MI dan SMP/MTs dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Jumlah SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Pasuruan

No.	Kecamatan	SD/MI		SMP/MTs	
		Jml sekolah	Jml siswa	Jml sekolah	Jml siswa
1.	Purwodadi	50	6.729	12	2.165
2.	Tutur	39	5.218	8	1.681
3.	Puspo	23	3.118	1	242
4.	Josari	20	2.038	2	378
5.	Lumbang	33	3.773	2	511
6.	Parepan	37	5.242	4	658
7.	Kejayan	49	10.809	2	534
8.	Wonorejo	37	6.75	7	1.478
9.	Purwosari	61	9.217	15	3.857
10.	Prigen	47	8.232	19	3.391
11.	Sukrorejo	54	9.672	15	4.137
12.	Pandaan	57	10.671	17	5.185
13.	Gempol	54	11.840	15	4.476
14.	Beji	47	8.649	17	3.3337
15.	Bangil	51	9.010	27	7.041
16.	Rembang	46	6.858	5	1.025
17.	Kraton	48	9.541	7	1.064
18.	Pohjentrek	22	3.326	3	1.191
19.	Gondang Wetan	21	11.079	14	2.325
20.	Rejoso	35	5.379	5	1.1135
21.	Winongan	34	4.362	4	970
22.	Grati	72	9.993	5	1.647
23.	Lekok	44	12.703	3	875
24.	Nguling	39	7.528	5	1.964
	Total	1040	180.062	214	51.467

Sumber: Profil Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan

B. Gambaran Umum SMP Negeri 1 Pandaan

1. Riwayat Singkat dan Letak SMP Negeri Pandaan

SMP Negeri 1 Pandaan berdiri tanggal 3 Maret 1976, sebagai lifial SMP Negeri 1 Bangil. Lokasi belajar sementara berada di SMPP Pandaan (SMA Negeri Pandaan, sekarang). Pendirinya adalah Bpk. Djoepiono, BA sekaligus sebagai kepala sekolah pertama, selama tiga tahun yaitu tahun 1976 hingga tahun 1979. Pada tahun 1977 pindah lokasi di Jalan Raya Kebonwaris 17 Pandaan dengan menempati gedung sendiri.

Perkembangan jumlah siswa:

- Tahun 1976 : 3 rombel/kelas

- b. Tahun 1977 : 8 rombel/kelas
- c. Tahun 1978 : 13 rombel/kelas
- d. Tahun 1980 s.d 1990 : 15 rombel/kelas
- e. Tahun 1991 s.d 2006 : 21 rombel/kelas

Sejak berdiri tahun 1976, SMP Negeri 1 Pandaan telah mengalami beberapa kali pergantian jabatan kepala sekolah. Berikut ini daftar nama-nama yang pernah menjabat sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 1 Pandaan:

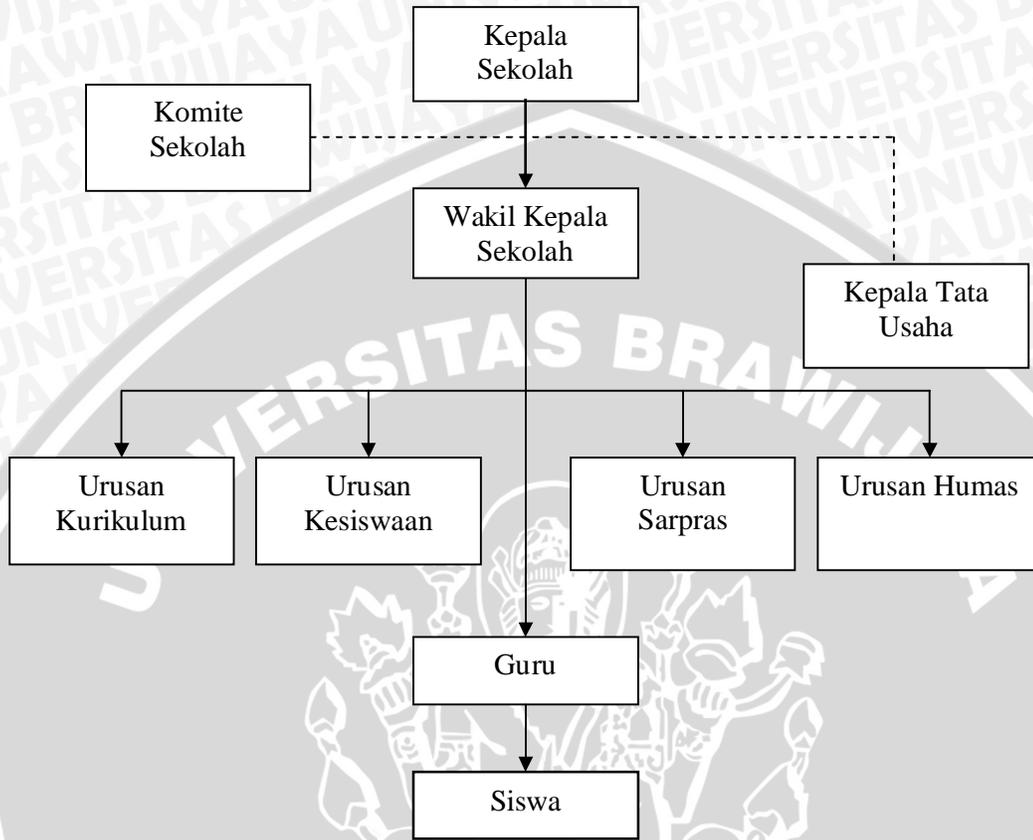
- a. Djoepiono, BA : 1976-1979
- b. Harijadi, BA : 1979-1982
- c. Muh. Djamaludin : 1982-1983
- d. R. Soewarno, BA : 1984-1989
- e. Parwoto : 1990-1993
- f. Karman : 1993-1995
- g. Nurul A'ini, BA : 1995-1999
- h. Drs. Haryono, MBA : 1999-2002
- i. Drs. Iswahyudi, MPd : 2002-2004
- j. Drs. Timbul Sudrajat, MPd : 2004-2007
- k. Drs. Hisyam, MPd : 2004- sekarang

Sampai saat ini animo masyarakat terhadap SMP Negeri 1 Pandaan masih sangat tinggi. Hal ini terbukti dari jumlah pendaftar dari tahun ke tahun semakin bertambah. Seiring berjalan waktu, SMP Negeri 1 Pandaan merupakan barometer pendidikan di Pasuruan dan sebagai salah satu sekolah unggulan di Kabupaten Pasuruan.

Terlebih lagi saat ini SMP Negeri Pandaan ditetapkan sebagai Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) yang didasarkan pada SK.Dirt.Pemb-SMP.Dir.Jen.MenDikdasmen, Departemen Pendidikan Nasional No. 533/C3/55. SMP Negeri 1 Pandaan ini merupakan satu-satunya SMP di Kabupaten Pasuruan yang menjadi Sekolah Bertaraf Internasional. Jadi, SMP 1 Pandaan menjadi sekolah rintisan SBI satu-satunya di Kabupaten Pasuruan. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas SMP 1 Pandaan memang baik.

Untuk mengetahui struktur organisasi di SMP Negeri 1 Pandaan dapat dilihat pada bagan berikut:

Bagan 3
Struktur Organisasi SMP Negeri 1 Pandaan



Sumber: Profil SMP Negeri 1 Pandaan

2. Keadaan Peserta Didik

Berdasarkan dokumentasi tahun 2007, jumlah peserta didik di SMP Negeri 1 Pandaan untuk tahun pelajaran 2004/2005 sebesar 989 siswa, tahun pelajaran 2005/2006 sejumlah 954 siswa dan 934 siswa untuk tahun pelajaran 2006/2007.

Perincian jumlah siswa tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4
Jumlah Siswa (tahun 2004-2007)

No.	Jumlah siswa	Tahun Pelajaran		
		2004/2005	2005/2006	2006/2007
1.	Kelas VII	326	295	316
2.	Kelas VIII	334	324	296
3.	Kelas IX	329	335	322
Jumlah		989	954	934

Sumber: Profil SMP Negeri 1 Pandaan

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah rata-rata siswa dalam 3 tahun terakhir relatif sama yakni diatas 900 siswa. Untuk tahun pelajaran 2006/2007 terbagi dalam 8-7 rombongan belajar (rombel)/kelas.

3. Kondisi Guru dan Tenaga Pelaksana

Guna mendukung proses pendidikan di sekolah, jumlah guru mata pelajaran yang ada di SMP Negeri 1 Pandaan telah sesuai dengan kebutuhan serta memenuhi kualifikasi. Dengan kata lain, mayoritas guru mengajar mata pelajaran yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Jumlah guru di SMP Negeri 1 Pandaan adalah 51 orang, yang terdiri dari 40 orang guru tetap dan 11 orang guru tidak tetap. Jumlah tenaga pelaksana di bagian Tata Usaha sebesar 20 orang. Perincian kondisi guru dan tenaga pelaksana dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 5
Pendidikan Guru dan Status Kepegawaian

Kualifikasi Pendidikan	Tetap	Tidak Tetap	Jumlah
S3	-	-	-
S2	1	-	1
S1	35	11	46
D4	-	-	-
D3	2	-	2
D2	-	-	-
D1	2	-	2
SLTA	-	-	-
Total	40	11	51

Sumber: Profil SMP Negeri 1 Pandaan

Tabel 6
Pendidikan Tenaga Pelaksana dan Status Kepegawaian

Kualifikasi Pendidikan	Tetap	Tidak Tetap	Jumlah
D3	1	1	2
SLTA	2	7	9
SMP	-	4	4
SD	1	4	5
Total	4	16	20

Sumber: Profil SMP Negeri 1 Pandaan

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dengan kualifikasi pendidikan yang memadai dari guru dan tenaga pelaksana TU dapat mempermudah dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing. Setiap komponen tersebut memiliki tugas-tugas yang telah diatur dan ditentukan.

Tugas-tugas dan wewenang dari setiap unsur adalah sebagai berikut:

- a) Kepala sekolah, meliputi:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang efektif dan efisien secara profesional.
 2. Menentukan pembagian tugas kepada dewan guru untuk mendampingi peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar.
 3. Menciptakan kondisi yang strategis dalam upaya kenyamanan dan ketentraman dalam penyelenggaraan pendidikan sekolah.
 4. Melaksanakan keputusan yang partisipatif dengan berbagai komponen sekolah.
 5. Mengoperasionalkan visi dan misi sekolah.
 6. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian rencana dan operasional terhadap program sekolah.
- b) Guru/tenaga pengajar, meliputi:
1. Melaksanakan keputusan kepala sekolah berdasarkan surat tugas No.800/198/403.53.1.1/2004 tentang pembagian tugas guru guna mendukung proses pembelajaran dalam rangka kerangka mutu pendidikan.
 2. Mengajar di kelas sesuai dengan fungsinya sesuai ketentuan Kepala Sekolah berdasar latar belakang keahlian yang dimiliki dan menggunakan strategi pengajaran yang bervariasi untuk mendorong pengmebnagn berfikir kritis, pemecahan masalah dan performa ketrampilan peserta didik.
 3. Mengimplementasikan berbagai teknis evaluasi pembelajaran dan memahami berbagai formal dan informal strategi evaluasi/pengujian untuk pengembangan kelanjutan dari peserta didik.
 4. Mengaktualisasikan tujuan dan isi kurikulum ke dalam berbagai kegiatan pembelajaran dan penjabaran serta mengembangkan materi pembelajaran sesuai dengan kondisi peserta didik dan sekolah dengan tidak menyimpang dari kurikulum yang ditetapkan.
 5. Memahami peran masyarakat dalam pendidikan dan mengembangkan serta memelihara hubungan kerjasama dengan mitra, orang tua dan masyarakat untuk mendukung pembelajaran dan kesejahteraan.
 6. Membantu kepala sekolah dalam setiap kegiatan yang mengacu pada penyelenggaraan pendidikan yang efektif dan efisien.

7. Membantu kesulitan setiap peserta didik, membimbing mereka selama di dalam maupun di luar jam pelajaran atau jam sekolah.

- c) Tenaga pelaksana, adalah melaksanakan tugas masing-masing personil kepegawaian untuk menunjang pelaksanaan administrasi dan penyelenggaraan pendidikan.

Semua unsur di atas tidak dapat bekerja sendiri, tetapi harus terintegrasi dalam satu kesatuan agar terselenggaranya pelayanan pendidikan yang profesional dapat terwujud secara maksimal. Disinilah letak peran dan tanggung jawab seluruh warga sekolah untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita SMP Negeri 1 Pandaan sehingga mampu menghasilkan lulusan yang unggul dan berprestasi.

4. Sarana dan Prasarana

Program kerja sekolah dan proses kegiatan belajar mengajar agar dapat terlaksana diperlukan dukungan berbagai macam sarana dan prasarana. SMP Negeri 1 Pandaan memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan. Pengadaan dan pemenuhan sarana dan prasarana melibatkan berbagai pihak yang ada di SMP Negeri 1 Pandaan. Sarana dan prasarana yang ada meliputi:

Tabel 7
Prasarana Sekolah

No.	Nama Ruang	Ukuran	Jml	Keadaan		
				B	C	K
1.	R. Kepala Sekolah	4 x 5 m	1		√	
2.	R. Tata usaha	6 x 12 m	1		√	
3.	R. komputer	6 x 8 m	1		√	
4.	Ruang BK	4 x 5 m	1	√		
5.	Ruang kelas 1	7 x 9 m	8		√	
6.	Ruang kelas 2	7 x 9 m	7		√	
7.	Ruang kelas 3	7 x 9 m	7	√		
8.	Ruang lab IPA	9 x 12 m	1		√	
9.	Ruang lab Bhs.inggris	8 x 12 m	1	√		
10.	Ruang perpustakaan	8 x 15 m	1	√		
11.	Ruang auditorium	14 x 9 m	1		√	
12.	Musholla	12 x 12 m	1	√		
13.	Ruang UKS	3 x 4 m	1		√	
14.	Ruang OSIS	2 x 4 m	1		√	
15.	WC Guru	2,5 x 3 m	4		√	
16.	WC Siswa	3 x 4 m	3			√

Keterangan :

B : kondisi gedung/ruang antara 70% sampai dengan 100%

C : kondisi gedung/ruang antara 40% sampai dengan 69%

K : kondisi gedung/ruang kurang dari 40%

Sumber: Profil SMP Negeri 1 Pandaan

5. Visi dan Misi SMP Negeri 1 Pandaan

a. Visi SMP Negeri 1 Pandaan

Tujuan pendidikan nasional dapat terwujud salah satunya dengan menerapkan pendidikan berorientasi kecakapan hidup melalui pendidikan berbasis luas (*Broad Based Education/BBE*) serta Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS). Oleh karena itu, visi SMP Negeri 1 Pandaan adalah:

“ Unggul Dalam Prestasi Akademi, Olahraga dan Seni Berdasarkan Iman dan Taqwa”

Melalui:

- 1) Unggul dalam perolehan NUN
- 2) Unggul dalam jumlah output yang diterima di SMU unggulan
- 3) Unggul dalam lomba karya ilmiah remaja
- 4) Unggul dalam lomba olahraga
- 5) Unggul dalam lomba seni
- 6) Unggul dalam kedisiplinan
- 7) Unggul dalam kepedulian sosial
- 8) Unggul dalam aktivitas keagamaan
- 9) Unggul dalam bidang ketrampilan
- 10) Unggul dalam lomba lingkungan hidup

b. Misi SMP Negeri 1 Pandaan

- 1) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif, agar setiap siswa bisa berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki sehingga mampu memanfaatkan pengetahuannya untuk memecahkan problematika yang dihadapi.
- 2) Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif pada setiap warga sekolah.
- 3) Menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh komponen sekolah dan kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah.

- 4) Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut dan juga budaya bangsa sehingga bisa menjadi sumber inspirasi dalam bertindak.
- 5) Membangun hubungan dengan masyarakat sekitar sekolah dan masyarakat internasional guna lebih menumbuhkembangkan pandangan dan wawasan siswa akan masa depan.

6. Kondisi Wali Peserta Didik

SMP Negeri 1 Pandaan berdiri di tengah masyarakat yang bervariasi dan dengan kultur yang cenderung modern sehingga pada umumnya telah mampu mengurus diri sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Adanya pemahaman yang kuat terhadap manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga masyarakat terbagi menurut macam-macam profesi dan keahlian. Demikian pula pada orang tua wali murid di SMP Negeri 1 Pandaan. Di bawah ini adalah data yang menunjukkan keadaan wali peserta didik. Dengan melihat data berikut dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan dan pekerjaan wali peserta didik rata-rata menunjukkan kesiapan dalam menunjang pelaksanaan dari semua program sekolah.

Tabel 8

Tingkat Pendidikan Orang Tua / Wali Murid

No.	Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1.	Sekolah dasar	118	12%
2.	SMP	287	29%
3.	SMU/SMK	283	29%
4.	Diploma	207	21%
5.	Perguruan tinggi	89	9%

Sumber: Profil SMP Negeri 1 Pandaan

Data diatas menunjukkan bahwa sebagian besar orang tua siswa atau wali murid memiliki latar belakang pendidikan yang cukup memadai. Dengan demikian, sekolah dapat melibatkan wali peserta didik dalam setiap perumusan kebijakan sekolah sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam mendukung pelaksanaan program-program sekolah. Dukungan orang tua/wali murid sangat besar dan memiliki arti penting dalam kesuksesan dan kelancaran penyelenggaraan pendidikan setiap murid (peserta didik). Oleh karena itu, segenap aspirasi dan keinginan dari wali murid yang muncul dapat dijadikan bahan masukan dan koreksi dalam setiap kebijakan hingga pelaksanaan dan

evaluasi. Keberadaan wali murid ini juga sebagai kontrol yang baik terhadap kebijakan yang dilakukan sekolah.

Tabel 9
Jenis Pekerjaan Orang Tua/Wali Murid

No.	Pekerjaan	Jumlah	Prosentase
1.	Guru	92	9%
2.	Pegawai negeri	147	15%
3.	TNI/POLRI	31	3%
4.	Pengusaha	50	5%
5.	Pegawai swasta	324	33%
6.	Pedagang	132	13%
7.	Tani/buruh tani	68	6%
8.	Tukang kayu/batu	98	10%
9.	Lain-lain	42	4%

Sumber: Profil SMP Negeri 1 Pandaan

Data diatas menunjukkan bahwa sebagian besar pekerjaan wali murid adalah swasta dengan persentase 33% dari keseluruhan jenis pekerjaan. Wali murid yang menjadi pegawai negeri sebanyak 15%. Data jenis pekerjaan wali murid dipakai untuk mengetahui tingkat ekonomi siswa.

7. Prestasi Siswa SMP Negeri 1 Pandaan

Indikator sekolah dikatakan berhasil atau memiliki mutu pendidikan yang baik salah satunya dapat dilihat dari prestasi yang diraih sekolah, baik prestasi akademik maupun prestasi non akademik. SMP Negeri 1 Pandaan sendiri merupakan sekolah menengah yang sarat prestasi di tingkat kabupaten maupun tingkat propinsi. Berikut ini data-data prestasi yang diraih siswa-siswi pada tahun 2004/2005.

Tabel 10
Prestasi Sekolah SMP Negeri 1 Pandaan

No.	Bidang Kejuaraan	Hasil Prestasi/ Juara ke...	Tingkat	Tahun
	A. Prestasi Akademik			
1.	Lomba MIPA	I	Kabupaten	2004
2.	Olimpiade Matematika	I	Kabupaten	2004
3.	Olimpiade Fisika	I	Kabupaten	2004
4.	Olimpiade Biologi	I	Kabupaten	2004
5.	Pidato Bahasa Inggris	II	Kabupaten	2004
6.	Siswa Teladan	I	Kabupaten	2004
7.	Lomba MIPA	I	Kabupaten	2005
8.	Writting Test	I	Kabupaten	2005
9.	Siswa Berprestasi	I	Kabupaten	2005

B. Prestasi Non Akademik

1.	Paduan Suara	X	Propinsi	2003
2.	Paduan Suara	I	Kabupaten	2004
3.	Lari 100 Meter Putri	I	Kabupaten	2004
4.	Lari 100 Meter Putra	I	Kabupaten	2004
5.	Renang	II	Kabupaten	2004
6.	Lari 100m Dan 200m	II	Kabupaten	2004
7.	Vokal Grup	I	Propinsi	2004
8.	Karaoke Keroncong	I	Kabupaten	2004
9.	Gerak Jalan Putri	I	Kabupaten	2004
10.	Patroli Keamanan Sekolah	III	Kabupaten	2004
11.	Vokal Grup	I	Propinsi	2004
12.	Baca Puisi	III	Kabupaten	2004
13.	Paduan Suara	I	Kabupaten	2004
14.	Catur	III	Kabupaten	2004
15.	Volly	II & III	Kabupaten	2005
16.	Lari 60m	I & II	Kabupaten	2005

Sumber: profil SMP Negeri 1 Pandaan

B. Penyajian data

1. Penerapan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

a. Instansi Terkait dalam Penerapan Program BOS

Pemerintah pusat memberikan bantuan pendidikan melalui Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) bidang pendidikan. Program ini ditujukan untuk meningkatkan partisipasi pendidikan khususnya kelompok miskin untuk mencegah dari kemungkinan putus sekolah, meningkatkan angka melanjutkan, dan mengembalikan anak-anak yang sudah terlanjur putus sekolah ke dalam sistem pendidikan dengan menyempurnakan satuan biaya beasiswa per siswa. Salah satu bentuk dari PKPS-BBM adalah Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Tujuan utama dari program ini adalah untuk membebaskan semua atau sebagian biaya dari pendidikan yang telah dikeluarkan oleh orang tua/wali siswa di tingkat SD/MI/SDLB dan orang tua/wali siswa di tingkat SMP/MTs/SMPLB baik negeri maupun swasta agar para siswa tersebut dapat menyelesaikan pendidikan dasarnya.

Instansi yang mengelola program BOS adalah tim PKPS-BBM Pusat, Tim PKPS-BBM Propinsi, Tim PKPS-BBM Kabupaten/Kota dan sekolah. Pada awal pelaksanaannya di tahun 2005, Departemen Pendidikan Nasional bekerjasama dengan Departemen Agama sehingga Tim PKPS-BBM baik di tingkat Pusat,

Propinsi, Kabupaten/Kota terdiri dari unsur Departemen/Dinas Pendidikan Nasional dan Departemen Agama.

Namun mulai tahun 2007 ini, pengelolaan program BOS dipisah antara Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama. Demikian pula istilah Tim PKPS-BBM diubah menjadi Tim Manajemen BOS. Pemisahan ini dimaksudkan agar tugas dan tanggungjawab menjadi lebih spesifik, selain itu agar pengelolaan dan penyaluran dana BOS ini menjadi lebih efektif dan efisien. Secara umum, tugas dan tanggungjawab Tim Manajemen BOS di tiap departemen dan tingkat pemerintahan tidak jauh berbeda. Hanya saja sesuai dengan Buku Panduan BOS tahun 2007 terdapat beberapa tambahan tugas dan tanggungjawab.

Adapun instansi yang mengelola program BOS sesuai dengan Buku Panduan BOS tahun 2007 ini setelah ada pemisahan antara Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama, menjadi:

a. Tim Pengarah

- 1) Tingkat Nasional
 - a) Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat
 - b) Ketua Bappenas
 - c) Menteri Pendidikan Nasional
 - d) Menteri Agama
 - e) Menteri Keuangan
 - f) Menteri Dalam Negeri
- 2) Tingkat Propinsi
 - a) Gubernur
 - b) Ketua Bappeda Propinsi
- 3) Tingkat Kabupaten/Kota
 - a) Bupati/Walikota
 - b) Ketua Bappeda Kabupaten/Kota

b. Tim Manajemen BOS Pusat

- 1) Tim Manajemen BOS Pusat Depdiknas
Penanggungjawab
 - a) Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah
 - b) Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

c) Direktur Pembinaan TK/SD

Tim Pelaksana:

- a) Ketua Tim/Pejabat Pembuat Komitmen
 - b) Sekretaris
 - c) Seksi Dana/Pemegang Uang Muka
 - d) Seksi Data
 - e) Seksi BOS dan BOS Buku SD
 - f) Seksi BOS dan BOS Buku
 - g) Seksi Monitoring & Evaluasi dan Penyelesaian Masalah
 - h) Seksi Publikasi/Humas
- 2) Tim Manajemen BOS Pusat Depag

Penanggungjawab

- a) Dirjen Pendidikan Islam, Departemen Agama

Tim Pelaksana

- a) Ketua Tim/Pejabat Pembuat Komitmen
 - b) Wakil Ketua
 - c) Sekretaris
 - d) Tim Teknis
 - e) Seksi Dana/Pemegang Uang Muka
 - f) Seksi Data
 - g) Seksi BOS dan BOS Buku MI/Salafiyah Ula
 - h) Seksi BOS dan BOS Buku Mts/Salafiyah Wustha
 - i) Seksi Monitoring & Evaluasi dan Penyelesaian Masalah
 - j) Seksi Publikasi/Humas
- 3) Tugas dan Tanggungjawab Tim Manajemen BOS Pusat
- a) Menyusun rancangan program.
 - b) Menetapkan alokasi dana dan sasaran tiap propinsi.
 - c) Merencanakan dan melakukan sosialisasi program.
 - d) Mempersiapkan dan melatih Tim Manajemen BOS Propinsi.
 - e) Melakukan penyusunan, pengandaan dan penyebar buku petunjuk pelaksanaan program.
 - f) Menyusun database sekolah/madrasah/ponpes tingkat nasional.

- g) Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- h) Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
- i) Memonitor perkembangan penyelesaian penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Propinsi dan Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota.
- j) Melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan kepada instansi terkait.

c. Tim Manajemen BOS Propinsi

1) Tim Dinas Pendidikan Propinsi

Penanggungjawab

- a) Kepala Dinas Pendidikan Propinsi

Tim Pelaksana

- a) Ketua Tim/Pejabat Pembuat Komitmen
- b) Sekretaris
- c) Seksi Dana/Pemegang Uang Muka
- d) Seksi Data
- e) Seksi BOS dan BOS Buku SD
- f) Seksi BOS dan BOS Buku SMP
- g) Seksi Monitoring & Evaluasi dan Penyelesaian Masalah
- h) Seksi Publikasi/Humas

2) Tim Depag Tingkat Propinsi

Penanggungjawab

- a) Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi

Tim Pelaksana

- a) Ketua Tim/Pejabat Pembuat Komitmen
- b) Wakil Ketua
- c) Sekretaris
- d) Tim Teknis
- e) Seksi Dana/Pemegang Uang Muka
- f) Seksi Data
- g) Seksi BOS dan BOS Buku MI/Salafiyah Ula
- h) Seksi BOS dan BOS Buku MTs/Salafiyah Wustha
- i) Seksi Monitoring & Evaluasi dan Penyelesaian Masalah

- j) Seksi Publikasi/Humas
- 3) Tugas dan Tanggungjawab Tim Manajemen BOS Propinsi
 - a) Menetapkan alokasi bantuan tiap kabupaten/kota.
 - b) Mempersiapkan sekretariat dan perlengkapannya di propinsi.
 - c) Mempersiapkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sesuai dengan dana dan kegiatan yang telah ditetapkan.
 - d) Merencanakan dan melakukan sosialisasi program di tingkat propinsi.
 - e) Mempersiapkan dan melatih Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota.
 - f) Melakukan pendataan bantuan.
 - g) Menyalurkan dana sosialisasi, operasional dan monitoring dan evaluasi ke Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota.
 - h) Menyalurkan dana ke sekolah/madrasah/ponpes sesuai dengan haknya (jumlah siswa).
 - i) Berkoordinasi dengan lembaga penyalur dan Tim Manajemen BOS Kab/Kota dalam penyaluran dana.
 - j) Mengumumkan nama sekolah/madrasah/ponpes dan besar dana bantuan yang diterima.
 - k) Merencanakan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
 - l) Bertanggungjawab terhadap kasus penyimpangan penggunaan dana di tingkat propinsi.
 - m) Melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan kepada Tim Manajemen BOS Pusat dan instansi terkait.
 - n) Mengupayakan penambahan dana untuk sekolah/madrasah/ponpes dari sumber APBD sesuai dengan yang tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2003.
 - o) Jika ada, segera melakukan realokasi dana BOS dari sekolah/madrasah/ponpes yang kelebihan dan kekurangan dana yang disebabkan oleh kesalahan pendataan.
 - p) Mengembalikan sisa dana yang ada di rekening penampung sebelum tahun anggaran berakhir ke kas negara. Kelebihan dana yang dimaksud adalah kelebihan dana setelah seluruh hak sekolah penerima dana BOS terpenuhi.

- q) Menampung kelebihan dana dari sekolah yang disebabkan oleh kelebihan data jumlah siswa dan selanjutnya mengembalikan ke kas negara jika seluruh hak sekolah penerima dana BOS telah terpenuhi.

d. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota

1) Tim Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Penanggungjawab

- a) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Tim Pelaksana

- a) Manajer
- b) Seksi Pendataan
- c) Seksi BOS dan BOS Buku SD
- d) Seksi BOS dan BOS Buku SMP
- e) Seksi Monitoring & Evaluasi dan Penyelesaian Masalah
- f) Seksi Publikasi/Humas

2) Tim Depag Tingkat Kabupaten/Kota

Penanggungjawab

- a) Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota

Tim Pelaksana

- a) Manajer
- b) Seksi Pendataan
- c) Seksi BOS dan BOS Buku MI/Salafiyah Ula
- d) Seksi BOS dan BOS Buku MTs/Salafiyah Wustho
- e) Seksi Monitoring & Evaluasi dan Penyelesaian Masalah
- f) Seksi Publikasi/Humas

3) Tugas dan Tanggungjawab Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota

- a) Menetapkan alokasi dana untuk setiap sekolah/madrasah/ponpes.
- b) Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada sekolah/madrasah/ponpes penerima.
- c) Melakukan pendatan sekolah/madrasah/ponpes.
- d) Melakukan koordinasi dengan Tim Manajemen BOS Propinsi dan lembaga penyalur dana, serta sekolah/madrasah/ponpes dalam rangka penyaluran dana.

- e) Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi.
 - f) Melaporkan pelaksanaan program ke Tim Manajemen BOS Propinsi.
 - g) Mengumpulkan data dan laporan dari sekolah/madrasah/ponpes dan lembaga penyalur.
 - h) Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
 - i) Bertanggungjawab terhadap kasus penyalahgunaan dana di tingkat kabupaten/kota.
 - j) Melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan kepada Tim Manajemen BOS Propinsi dan instansi terkait.
- e. Tingkat Sekolah/Madrasah/Ponpes
- 1) Penanggungjawab
 - a) Kepala Sekolah/Madrasah/Penanggungjawab Program Wajar Dikdas Salafiyah.
 - b) Kepala Sekolah/Madrasah/Penanggungjawab Program Wajar Dikdas Salafiyah menunjuk guru/bendahara yang akan bertanggungjawab dalam mengelola dana BOS di tingkat sekolah/madrasah/ponpes.
 - 2) Tugas dan Tanggungjawab Sekolah/Madrasah/Ponpes
 - a) Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada. Bila jumlah dana yang diterima melebihi dari yang semestinya maka harus segera mengembalikan kelebihan dana tersebut ke rekening Tim Manajemen BOS Propinsi dengan memberitahukan ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota.
 - b) Bersama-sama dengan Komite Sekolah/Madrasah/Pengasuh Ponpes, mengidentifikasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran.
 - c) Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan.
 - d) Mengumumkan daftar komponen yang boleh dan yang tidak boleh dibiayai oleh dana BOS serta penggunaan dana BOS di sekolah menurut komponen dan besar dananya di papan pengumuman sekolah/madrasah/ponpes.

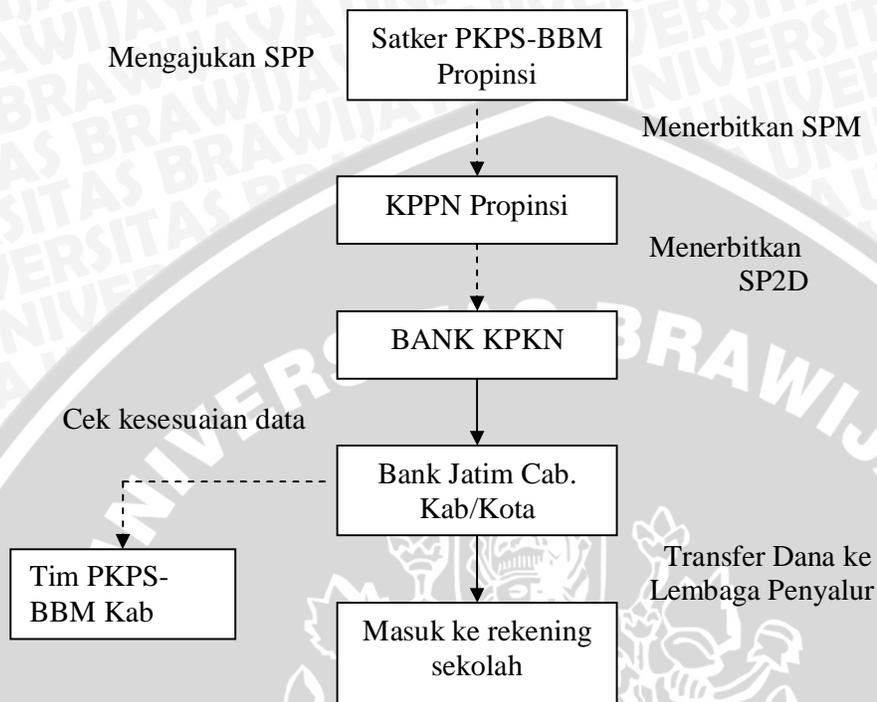
- e) Bertanggungjawab terhadap penyimpangan pengaduan masyarakat.
- f) Melaporkan penggunaan dana BOS kepada Tim Manajemen BOS Kab/Kota.

Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan tidak menunjuk tim khusus untuk menangani program BOS. Tim Manajemen BOS Kabupaten Pasuruan merupakan para pegawai dari Subdin Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan. Jadi, dengan adanya program BOS ini Subdin Perencanaan mendapat 'pekerjaan' tambahan di luar tugas pokok dan fungsi yang sudah ada sebelumnya. Subag Perencanaan menunjuk 3 orang pegawai sebagai Tim Pelaksana program dan Kasubdin PP sebagai manajer Tim Manajemen BOS Kabupaten Pasuruan.

b. Mekanisme Penyaluran Dana dari Program BOS oleh Tim Manajemen BOS ke sekolah

Mekanisme penyaluran dana BOS yang dilakukan oleh Tim PKPS-BBM di tingkat propinsi melalui Bank Pemerintah/Kantor Pos. Proses penyaluran dana BOS agar bisa sampai ke rekening masing-masing sekolah harus melalui beberapa tahap. Tim PKPS-BBM Kabupaten mengirim SK Alokasi Dana BOS beserta daftar sekolah/madrasah/ponpes penerima BOS ke Tim PKPS-BBM Propinsi. Kemudian, Tim PKPS-BBM Propinsi melakukan verifikasi terhadap Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), SPM tersebut diverifikasi oleh KPPN Propinsi. Dana BOS yang telah dicairkan ditampung di rekening penampung Tim PKPS-BBM Propinsi. Sebelum dana disalurkan ke masing-masing lembaga penerima BOS, Bank Jatim sebagai lembaga yang ditunjuk untuk menyalurkan dana, melakukan pengecekan terhadap kesesuaian data dari Tim PKPS-BBM Propinsi dengan alokasi dana yang terdapat di Tim PKPS-BBM Kabupaten. Jika data telah sesuai, maka Bank Jatim Cabang Kabupaten dapat menyalurkan dana BOS ke masing-masing rekening lembaga penerima. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

Bagan 4 Mekanisme Penyaluran Dana BOS



Sumber: data diolah

Terdapat perbedaan dalam mekanisme penyaluran dana yaitu antara tahun 2006 dengan tahun 2007. Jika sesuai dengan Buku Panduan BOS tahun 2006, dana BOS dari propinsi yang disalurkan ke bank tidak bisa langsung disalurkan ke masing-masing sekolah, tapi masih harus ditahan terlebih dahulu di bank minimal 1 hari. Di Jawa Timur, bank yang ditunjuk untuk menyalurkan dana BOS adalah PT Bank Jatim. Uang yang tidak segera disalurkan tersebut, meski hanya setengah hari akan menimbulkan bunga. Dan hal ini kemudian dipermasalahan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada saat pemantauan. Permasalahan ini timbul karena belum ada aturan tentang bunga bank yang didapat dari dana BOS. Oleh karena itu, dibuatlah Buku Panduan BOS tahun 2007 yang mengatur tentang mekanisme penyaluran dana. Pada dasarnya masih sama, hanya saja disini ditekankan dan diatur lagi tentang dana yang masih harus ditampung di Bank Jatim. Jadi, menurut Buku Panduan BOS Tahun 2007, setelah propinsi menyalurkan dana ke bank, Tim Manajemen BOS Propinsi membuka rekening di Bank Jatim yang disebut rekening penampung. Dana tersebut harus sudah

disalurkan ke seluruh rekening sekolah penerima dana BOS dalam waktu maksimal 3 hari. Jika dalam waktu itu Bank Jatim belum mampu menyalurkan dana ke semua rekening sekolah, maka akan dikenakan sanksi. Di Kabupaten Pasuruan, proses penyaluran ini bisa selesai dalam waktu sehari. Seperti yang diutarakan oleh Ibu Enidah Made Ruswati, M.Pd, selaku manager Tim Manajemen BOS Kabupaten Pasuruan,

“kalau di Buku Panduan yang tahun 2006, dana yang diterima Bank Jatim langsung di bagi ke rekening sekolah. Dan proses ini butuh waktu sehari-hari, sehingga dana BOS harus ditampung dulu di bank. Bunga bank yang ditimbulkan kemudian dipermasalahan oleh BPK. Makanya pada buku panduan yang baru, ada aturan kabupaten harus membuka rekening di bank untuk menampung sementara dana BOS yang *ngendon* tadi. Tapi untungnya, Kabupaten Pasuruan sudah mampu menyalurkan dana BOS dalam waktu sehari.” (wawancara tanggal 17 Juli 2007)

Pada tahun 2006 BPK melakukan pemeriksaan atas Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun dan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2005 dan 2006 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kabupaten Pasuruan. Hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan Program BOS memuat tiga item yang diperiksa yaitu ketepatan sasaran, ketepatan jumlah dan ketepatan waktu.

Untuk periode Juli-desember 2005, Kabupaten Pasuruan mendapat alokasi dana BOS dari propinsi sebesar Rp 38.992.610.220,00 yang diberikan sekaligus untuk satu semester. Dana tersebut disalurkan ke BPD Cabang Kabupaten Pasuruan sebesar Rp 28.011.996.750,00. Dari jumlah tersebut yang telah disalurkan ke masing-masing sekolah penerima Rp 27.948.712.000,00.

Periode Januari-Desember 2006, Kabupaten Pasuruan mendapat alokasi dana BOS sebesar Rp 58.606.724.088,00 yang diberikan per dua bulanan. Secara lebih terperinci penyaluran dana BOS di tiap dua bulanannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11
Penyaluran Dana BOS Periode Januari-Juni 2006

No.	Periode Bulan	Jumlah Dana (dalam Rp)
1.	Januari-Februari	13.302.625.083
2.	Maret-April	9.510.387.417
3.	Mei-Juni	9.297.186.667
Total		31.810.099.107

Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2006

Dan sampai pada bulan Agustus 2006 dana BOS telah disalurkan sebesar Rp 37.208.972.540,00 kepada sekolah SD/MI/salafiyah dan SMP/MTs/Salafiyah yang ada di 24 kecamatan. Sisanya sebesar Rp 4.191.980.627,00 belum disalurkan ke Kas Negara. Dana BOS tersebut telah dimanfaatkan oleh sekolah-sekolah penerima antara lain untuk mengurangi iuran bulanan dari para siswa.

Berkaitan dengan jumlah dana yang dialokasikan kepada masing-masing sekolah, terlihat bahwa terdapat kelebihan dana. Pada tahun 2005 terdapat kelebihan dana sebesar Rp 10.979.326.044,00 dan sebesar Rp 367.384.544,00 di tahun 2006. Jadi, total kelebihan dana sebesar Rp 11.347.326.044,00.

Proses penyaluran dana BOS yang dilakukan PT Bank Jatim mengalami keterlambatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2005, keterlambatan mulai dari 1 sampai 20 hari dan 1 sampai 15 hari di tahun 2006 pada setiap periode penyaluran dana.

Terkait dengan hasil pemeriksaan dari BPK tersebut, Tim PKPS-BBM kabupaten menjelaskan bahwa pada awal penerapan program BOS terdapat beberapa persoalan di lapangan, seperti ketidaktepatan jumlah alokasi dana maupun keterlambatan penyaluran dana. Namun, persoalan-persoalan tersebut telah mampu diminimalisir dapat periode-periode berikutnya. Seperti yang dituturkan oleh Ibu Enidah Made Ruswati, M.Pd, Manager PKPS-BBM Kab. Pasuruan, “memang waktu itu ada audit dari BPK di Kabupaten. Dan pada kenyataannya memang ada beberapa persoalan. Tapi sekarang sudah ada perbaikan kinerja sehingga persoalan-persoalan sudah bisa dikurangi.”

Terdapat beberapa syarat dalam penyaluran dana, antara lain:

- a. Bagi sekolah/madrasah/ponpes yang belum memiliki rekening rutin, harus membuka nomor rekening atas nama lembaga (tidak boleh atas nama pribadi).

- b. Sekolah/madrasah/ponpes mengirimkan nomor rekening tersebut kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota.
- c. Tim Manajemen Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan mengkompilasi nomor rekening sekolah/madrasah/ponpes dan selanjutnya dikirim kepada Tim Manajemen BOS Propinsi.

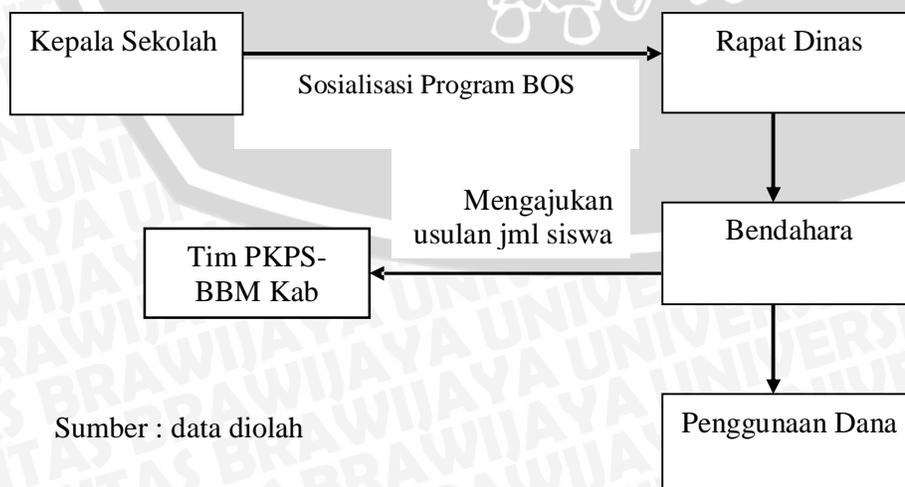
c. Mekanisme Penerapan Program BOS yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Pandaan

Langkah-langkah yang ditempuh SMP Negeri 1 Pandaan dalam penerapan program BOS diawali dengan melakukan sosialisasi program BOS kepada Dewan Guru dan Komite Sekolah pada saat rapat dinas. Sosialisasi yang dilakukan kepala sekolah ini menyangkut tentang tujuan, sasaran serta prosedur penyaluran dana BOS. Kemudian Kepala Sekolah menunjuk Bendahara SMP Negeri 1 Pandaan untuk mengelola dana BOS dengan dibantu oleh para staf TU.

Langkah berikutnya, bendahara mendata seluruh jumlah siswa yang ada di SMP Negeri 1 Pandaan untuk diusulkan ke Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota yang berada di Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Pasuruan. Setelah usulan diterima Tim PKPS-BBM Kabupaten dengan dikeluarkannya SK Alokasi Dana, bendahara menyusun RAPBS yang telah dilengkapi dengan penggunaan dana BOS. Kemudian setelah dana cair, Kepala Sekolah dan Bendahara mengambil dana di Bank Jatim. Bagan di bawah ini menguraikan mekanisme penerapan program BOS di SMP 1 Pandaan.

Bagan 5

Mekanisme Penerapan Program BOS di SMP 1 Pandaan



Sumber : data diolah

Tim Manajemen BOS Propinsi melalui Bank Jatim telah menyalurkan dana BOS ke rekening sekolah setiap 3 bulan sekali. Dana BOS tersebut telah menjadi hak sekolah. Meskipun dana BOS telah dimasukkan ke rekening masing-masing sekolah penerima, namun sekolah tidak bisa mengambil dana sewaktu-waktu sesuai keinginan dan kebutuhan sekolah. Sebelum mengambil dana BOS, sekolah harus menyerahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bulan sebelumnya dan RAPBS untuk mengambil dana BOS bulan berikutnya ke Tim Manajemen BOS Kabupaten Pasuruan. Setelah dilakukan pengecekan atas SPJ, Tim PKPS-BBM Kabupaten memberikan Bukti Pencairan BOS kepada lembaga untuk mencairkan dana. Ibu Hilda Amiliah, staf Tim PKPS-BBM Kabupaten Pasuruan menuturkan, “sebelum mencairkan dana pada setiap bulannya, lembaga harus menyerahkan SPJ dan RAPBS bulan sebelumnya. Lalu kita cek kesesuaian dana dan penggunaannya. Kemudian lembaga diberi Bukti Pencairan BOS untuk mencairkan dana di Bank Jatim. Dana BOS ini harus diambil tiap bulan. Jika dalam beberapa bulan dana tidak diambil, lembaga akan dapat sanksi.” (wawancara tanggal 17 Juli 2007)

Penyerahan SPJ dan RAPBS ini dilakukan setiap bulan agar pelaporan berjalan tertib dan untuk mengurangi terjadi penyimpangan. Jika tidak dilakukan per bulan, pihak sekolah umumnya enggan untuk membuat pertanggung jawaban dana dan hal ini bisa memberikan peluang adanya penyimpangan. Terutama di tingkat SD yang dana operasional sekolah sama atau dibawah dana BOS.

Jumlah siswa yang mendapat dana BOS di SMP Negeri 1 Pandaan pada tahun ajaran 2006/2007 adalah 933 siswa. Sedangkan untuk periode awal penerapan program BOS yaitu tahun ajaran 2005/2006, siswa SMP Negeri 1 Pandaan yang mendapat dana sebesar 954 siswa. Jumlah ini merupakan keseluruhan siswa di SMP Negeri 1 Pandaan. Bagi siswa yang tidak mampu juga mendapat subsidi silang sehingga siswa-siswa tersebut dapat memperoleh pendidikan tanpa mengeluarkan biaya SPP tiap bulannya. Jumlah siswa mendapat pembebasan biaya 30 siswa, yaitu dari kelas VII sebanyak 8 siswa, kelas VIII sebanyak 10 siswa dan dari kelas IX sebanyak 12 siswa. Secara lebih rinci siswa yang menerima dana BOS dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12
Jumlah Siswa Penerima BOS Tahun Ajaran 2006/2007

No.	Kelas	TA 2005/2006	TA 2006/2007
1.	VII	295 siswa	315 siswa
2.	VIII	324 siswa	296 siswa
3.	IX	335 siswa	322 siswa
	Total	954 siswa	933 siswa

Sumber: data diolah

Dari jumlah siswa diatas, maka dana BOS yang diterima SMP Negeri 1 Pandaan untuk tahun ajaran 2006/2007 sebesar Rp. 302.758.500,00. Setiap siswa memperoleh Rp 324.500,00 per tahun. Dana BOS ini tidak diberikan langsung kepada siswa berupa uang tunai. Namun, dana BOS dikelola oleh sekolah untuk membantu biaya operasional sekolah.

Dana BOS yang diperoleh SMP Negeri 1 Pandaan dimanfaatkan untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar. Secara terperinci dana BOS di SMP Negeri 1 Pandaan digunakan untuk :

1. Penerimaan siswa baru/MOS
 - a. Alat tulis kantor
 - b. Konsumsi panitia
 - c. Transport panitia PSB/MOS
2. Buku pelajaran pokok dan buku penunjang untuk perpustakaan
 - a. Pengadaan buku-buku fiksi
 - b. Pengadaan buku-buku non fiksi
 - c. Buku-buku penunjang pelajaran
 - d. Perawatan rak buku
 - e. Pengadaan kartu anggota perpustakaan
 - f. Pengadaan buku perangkat pembelajaran
3. Biaya peningkatan mutu guru
 - a. Kegiatan MGMP
 - b. Kegiatan MKKS
 - c. Seminar/pelatihan guru
 - d. Pengadaan perangkat KBK
4. Kegiatan evaluasi
 - a. Ulangan harian

- b. Ulangan semester
- c. Ujian akhir sekolah
5. Kegiatan penyelenggaraan pelajaran
 - a. Alat/bahan pelajaran
 - b. Bahan teori dan praktik
 - c. Alat/bahan praktikum
6. Tata usaha sekolah
 - a. Alat/bahan tata usaha
 - b. Alat/bahan kebersihan
 - c. Belanja gula, kopi dan teh
7. Langganan daya dan jasa, yaitu langganan listrik, telepon, dan koran
8. Biaya pemeliharaan
 - a. Pemeliharaan alat
 - b. Pemeliharaan bangunan dan taman
9. Membayar honorarium guru dan tenaga kependidikan honorer
 - a. Honorarium PTT dan GTT
 - b. Honorarium kegiatan remidi/pengayaan
10. Membiayai kegiatan siswa
 - a. Kegiatan ekstra kurikuler komputer, yang mencakup: transport pengelola/pembina, pengadaan bahan dan biaya perawatan.
 - b. Kegiatan ekstra kurikuler Bahasa Inggris, yang mencakup: transport pengelola/pembina, pengadaan bahan dan biaya perawatan.
11. Pelaporan
 - a. Biaya pelaporan
 - b. Transpor pelaporan

Pengalokasian dana BOS di SMP Negeri 1 Pandaan didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Kepala Sekolah, Dewan Guru, Staf Tata Usaha dan Komite Sekolah dalam rapat dinas sekolah. Menurut Buku Panduan BOS, pihak sekolah diberi kewenangan untuk mengelola sendiri dana BOS yang diterima sejauh tidak menyimpang dari aturan yang ada. Dengan demikian, penggunaan dana BOS di tiap-tiap sekolah tidak harus sama persis karena setiap sekolah memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

d. Mekanisme Monitoring dan Pelaporan Program BOS yang Dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota pada Sekolah.

Kegiatan monitoring dalam program BOS ditujukan untuk meyakinkan bahwa dana BOS diterima uang berhak dalam jumlah, cara dan penggunaan yang tepat. Bentuk kegiatan monitoring adalah melakukan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BOS. Komponen utama yang dimonitor antara lain mencakup alokasi dana sekolah penerima bantuan, penyaluran dan penggunaan dana, pelayanan dan pengaduan, administrasi keuangan, serta pelaporan.

Kegiatan monitoring ini dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Pusat, Tim Manajemen BOS Propinsi, dan Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota. Namun, penelitian ini difokuskan pada mekanisme pemantauan yang dilakukan Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan program BOS di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Pasuruan, khususnya di SMP Negeri 1 Pandaan. Kegiatan monitoring dilakukan setiap akhir semester, sehingga dalam setahun terdapat dua kali pemantauan. Terdapat dua macam monitoring yaitu monitoring pelaksanaan program dan penanganan pengaduan. Monitoring pelaksanaan program yang dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota ditujukan untuk memantau penyaluran dan penyerapan dana di sekolah serta memantau penggunaan dana di tingkat sekolah. Kegiatan ini dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana. Sedangkan monitoring penanganan pengaduan bertujuan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang muncul di sekolah. Pada kegiatan ini Tim Manajemen BOS menjalin kerjasama dengan pihak terkait yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Pemantauan awal dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota Pasuruan dengan cara melihat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang dikirim oleh sekolah. Dari SPJ tersebut dapat dilihat mengenai pelaksanaan program BOS di sekolah tersebut. Apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan program BOS maka Tim Manajemen Kabupaten/Kota akan mendatangi sekolah yang bersangkutan atau memanggil perwakilan sekolah untuk memberikan pengarahan. Pemantauan ini dilakukan secara berkesinambungan dan seterusnya demi maksimalnya pelaksanaan program BOS.

Selain kegiatan monitoring, juga dilaksanakan pengawasan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan negara, pungutan liar dan bentuk penyelewengan lainnya. Pengawasan terhadap program ini dilakukan oleh lembaga yang berkompeten, antara lain:

- a. Instansi pengawasan: BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal, dan Bawasda Propinsi dan Kabupaten/Kota.
- b. Tim Monitoring Independen: Perguruan Tinggi, DPR, BIN atau Tim Independen Khusus yang ditunjuk pemerintah.
- c. Unsur masyarakat dari unsur Dewan Pendidikan, LSM, BMPS, maupun organisasi kemasyarakatan/kependidikan lainnya.
- d. Unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah/madrasah, Kabupaten/Kota, Propinsi dan Pusat.

Tim Manajemen BOS Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan monitoring bekerja sama dengan beberapa pihak, yakni Badan Pengawas Daerah (Bawasda), Polres Pasuruan, LSM dan pengawas dari Dinas Pendidikan di kecamatan.

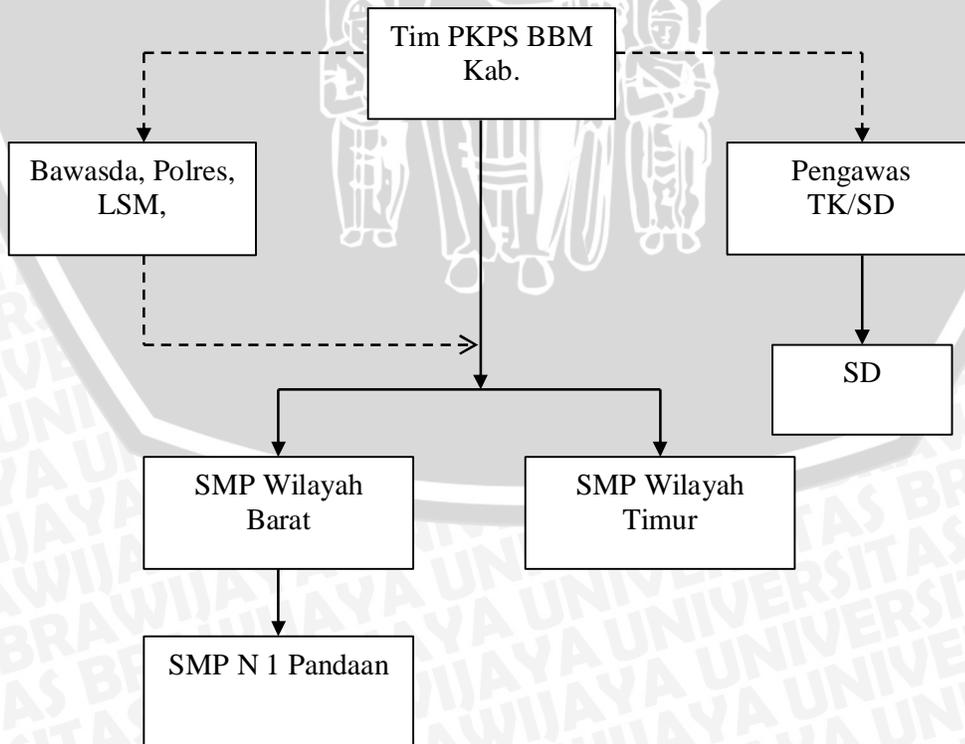
Pengawasan dilakukan di Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota, dimana proses pengawasan pada semester ini tidak melibatkan semua sekolah yang menerima dana BOS. Pada awal penerapan program BOS, kegiatan monitoring dan evaluasi didanai oleh dana *safeguarding* dari Tim Manajemen BOS Pusat. Dana *safeguarding* ini digunakan untuk membiayai kegiatan *safeguarding* yang meliputi pelatihan, sosialisasi, pencitraan publik, monitoring dan evaluasi dan pelaporan. Dengan adanya dana ini kegiatan monitoring di Kabupaten Pasuruan mampu mencakup seluruh kecamatan yang berjumlah 24 kecamatan. Pemberian dana *safeguarding* tersebut berlangsung hingga semester awal tahun anggaran 2007. Maka, untuk semester berikutnya Tim Manajemen Kabupaten tidak mengambil dana dari APBD II. Kegiatan monitoring murni berasal dari *safeguarding* dari pusat. Oleh karena itu, monitoring tidak dapat dilakukan di seluruh SD/SMP penerima BOS. Di setiap kecamatan diambil sampling beberapa sekolah saja. Kurangnya dana juga menjadi faktor, disamping minimnya dana untuk kegiatan monitoring. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Enidah Made Ruswati, M.Pd, selaku Manager PKPS-BBM Kabupaten Pasuruan,

“pada semester awal tahun anggaran 2007 didanai pusat. Maka dari itu untuk semester berikutnya kabupaten pasuruan tidak mengambil dana APBD II untuk monitoring, namun ternyata Pusat tidak memberi dana. Ya kalau *gitu*, nanti hanya akan melakukan monitoring di 10 kecamatan saja sebagai sampel. Memang tidak mewakili tapi kalau tidak ada dana mau *gimana* lagi.” (wawancara tanggal 17 Juli 2007)

Lebih lanjut, Ibu Hilda Amiliyah dari Tim Manajemen BOS Kabupaten Pasuruan menjelaskan, ”monitoring dilaksanakan di setiap kecamatan, tapi tidak semua. Hanya diambil sampling saja. Biar lebih gampang, wilayah Kabupaten Pasuruan dibagi 2 yaitu wilayah barat dan timur. Karena memang tenaganya terbatas, dananya juga. Kalau untuk SD yang melaksanakan monitoring dari Pengawas TK/SD. Disini kita juga memberdayakan pengawas TK/SD di tingkat kecamatan. Jadi kita sama-sama kerja”.

Tim Manajemen BOS Kabupaten Pasuruan membagi kecamatan-kecamatan menjadi 2 yaitu wilayah barat dan wilayah timur untuk memudahkan kegiatan monitoring. Monitoring untuk tingkat SMP dilaksanakan oleh Tim PKPS-BBM Kabupaten Pasuruan, sedangkan monitoring tingkat dilakukan oleh Pengawas TK/SD. Mekanisme monitoring ini dapat diuraikan dalam bagan berikut:

Bagan 6
Mekanisme Monitoring



Keterangan:

-----> = bekerjasama dengan

—————> = monitoring langsung

Sumber: Data diolah

SMP Negeri 1 Pandaan merupakan salah satu SMP yang dijadikan sampel untuk kegiatan monitoring yang berada di wilayah barat. Pada saat monitoring ini, pihak sekolah harus menyertakan RAPBS dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) terkait penggunaan dana BOS. Instansi-instansi yang melakukan pengawasan adalah dari LSM, kepolisian dan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ibu Dra. Rien Sulistyowati, bendahara SMP Negeri 1 Pandaan menuturkan,

“waktu monitoring itu yang datang saya dan Bapak kepala sekolah sambil bawa RABPS dan SPJ BOS. Lapornya yang dibuat harus benar-benar transparan, *nggak* boleh ada dana yang *nggak* jelas. Karena hal itu bisa jadi masalah. Yang monitor dari banyak pihak mbak, ada dari LSM, kepolisian dan dari Diknas sendiri. Kita pindah dari meja satu ke meja yang lain. Pokoknya seperti pesakitan yang sedang dimintai pertanggungjawaban.”(wawancara tanggal 10 Mei 2007)

Dari penuturan bendahara SMPN 1 Pandaan tersebut dapat diketahui bahwa kegiatan monitoring yang diterapkan oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten Pasuruan cukup ketat. Kegiatan ini melibatkan instansi-instansi yang terkait dan berlapis-lapis hingga memberi kesan kalau proses monitoring ini membebani pihak sekolah.

Untuk memudahkan proses pengawasan atas penggunaan dana, pihak sekolah harus menyertakan pertanggungjawaban keuangan yang berupa pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang, serta pelaporan keuangan. Pertanggungjawaban keuangan ini, secara rinci harus mencantumkan:

- a. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), yang mencakup penggunaan dana BOS yang telah disepakati oleh Kepala Sekolah/Dewan Guru, Komite Sekolah/madrasah; rincian penggunaan dana per jenis anggaran.
- b. Pengelolaan dana BOS berpedoman pada:
 - 1) Ketentuan pembayaran atas dana
 - 2) Ketentuan pengadaan barang/jasa instansi pemerintah

- 3) Ketentuan perpajakan
 - 4) Ketentuan pembukuan keuangan negara
- c. Pembukuan
- 1) Pengelola dana BOS diwajibkan Membuat Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas Tunai, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak dan Buku Pembantu lainnya sesuai kebutuhan.
 - 2) Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu yang relevan sesuai dengan urutan tanggal kejadiannya.
 - 3) Setiap akhir bulan Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu ditutup oleh Bendahara dan diketahui oleh Kepala Sekolah.
 - 4) Uang tunai yang ada di Kas Tunai tidak lebih dari Rp. 5 juta.
- d. Bukti pengeluaran
- 1) Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuintansi yang sah
 - 2) Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan bea materai. Untuk transaksi dengan nilai sampai Rp.250.000,- tidak dikenai bea materai, sedang transaksi dengan nilai nominal antara Rp 250.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,- dikenai bea materai dengan tarif sebesar Rp 3.000,- dan transaksi dengan nominal lebih besar Rp 1.000.000,- dikenai bea materai dengan tarif sebesar Rp 6.000,-
 - 3) Uraian pembayaran dalam kuintansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya
 - 4) Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk sebagai lampiran kuintansi
 - 5) Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas dibayar oleh Bendahara.

Pelaporan pelaksanaan program BOS dilakukan setiap triwulan, semester dan tahunan. Pelaporan merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dana BOS dan sebagai bagian dari kegiatan monitoring. Pelaporan pertanggungjawaban harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Laporan pertanggungjawaban keuangan BOS harus dilampiri dengan:
 - 1) Bukti kuintansi pembayaran
 - 2) Fotokopi Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kas Negara melalui Kantor Pos/Bank Pemerintah setempat.
- b. Setiap kegiatan wajib dibuatkan laporan hasil pelaksanaan kegiatannya
- c. Seluruh arsip data keuangan, baik yang berupa laporan-laporan keuangan maupun dokumen pendukungnya, disimpan dan ditata rapi dalam urutan nomor dan tanggal kejadiannya, serta disimpan di suatu tempat yang aman dan mudah untuk ditemukan setiap saat.

Pelaporan pelaksanaan program BOS disusun oleh bendahara sebagai pelaksana langsung di SMP Negeri 1 Pandaan dengan persetujuan kepala sekolah yang kemudian diberikan kepada Tim Manajemen Kabupaten/Kota Pasuruan. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh bendahara sekolah, Ibu Rien Sulistyowati, "pelaporan dilakukan tiap akhir semester sekali dengan melampirkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang disusun oleh Bendahara sebagai pelaksana langsung yang diberikan kepada Cabang Dinas." (wawancara dengan Ibu Dra. Rien Sulistyowati, pada tanggal 10 Mei 2007)

Jenjang pelaporan penerapan program BOS di SMP Negeri 1 Pandaan dilakukan sebagai berikut:

- a) Sekolah melaporkan penggunaan dana BOS ke Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota pada setiap akhir semester.
- b) Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota melaporkan kegiatan pelaksana monitoring kepada Tim Manajemen BOS Propinsi. Laporan monitoring rutin dikirimkan ke Tim Manajemen BOS Propinsi paling lambat 10 hari setelah pelaksanaan monitoring.
- c) Tim Manajemen BOS Propinsi melaporkan semua kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan program BOS pada akhir semester. Laporan monitoring rutin dikirimkan ke Tim Manajemen BOS pusat paling lambat 15 hari setelah pelaksanaan monitoring.

Proses pelaporan ini juga tidak berbeda dengan yang ada dalam Buku Panduan BOS. Baik dari segi bentuk pelaporannya maupun instansi-instansi terkait yang terlibat dalam pelaporan tersebut.

e. Hasil Penerapan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SMP Negeri 1 Pandaan

Sebuah program pemerintah dibuat memiliki tujuan dan hasil yang hendak dicapai, demikian pula dengan program BOS. Tujuan tersebut dapat diraih melalui pelaksanaan program oleh pihak-pihak terkait yaitu Kepala Sekolah sebagai puncak pimpinan serta penanggungjawab dengan dibantu oleh Bendahara Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah. Tujuan utama dari program BOS ini telah tercapai yakni berkurang atau turunnya biaya SPP siswa, sekaligus meringankan beban orang tua wali murid. Sebelum ada BOS orang tua siswa harus membayar biaya SPP sebesar Rp. 45.000,-/bulan. Setelah ada dana BOS biaya SPP yang harus dibayar orang tua siswa berkurang menjadi Rp. 17.500,-/bulan. Selain itu, biaya daftar ulang yang biasanya dibayarkan pada awal tahun ajaran baru ditiadakan sejak ada dana BOS ini.

Menurut salah satu orang tua siswa, Ibu Romiyati yaitu ibu dari Fika Sari menuturkan bahwa adanya dana BOS cukup membantu meringankan beban orang tua. “iya mbak, sekarang uang SPP jadi lebih murah sejak ada BOS. Sekarang tiap bulan cuma bayar Rp 17.500,00. BOS itu cukup membantu apalagi buat saya yang penghasilannya pas-pasan.”

Meskipun dana BOS telah mampu mengurangi biaya SPP per bulan hingga lebih dari 50%, bukan berarti biaya pendidikan di SMP Negeri 1 Pandaan otomatis menjadi ringan karena masih banyak pungutan-pungutan lain. Orang tua siswa harus membayar buku-buku Lembar Kerja Siswa (LKS) dan biaya bimbingan belajar hingga ratusan ribu rupiah. Bimbingan belajar ini merupakan pelajaran tambahan di luar jam pelajaran untuk persiapan menghadapi UAN bagi kelas IX.

Program BOS yang dikeluarkan pemerintah adalah untuk menuntaskan Wajar Dikdas 9 tahun dan untuk peningkatan mutu pendidikan. Di SMP Negeri 1 Pandaan sendiri telah mampu menyelesaikan program Wajar Dikdas 9 tahun. Hal ini terlihat dari tidak adanya siswa yang putus sekolah. Demikian pun jika dilihat dari mutu pendidikannya, SMP Negeri 1 Pandaan merupakan sekolah unggulan dengan mutu yang cukup baik. Indikator sekolah dikatakan bermutu dapat dilihat dari prestasi yang diraih baik prestasi akademik maupun non akademik. Pada

UAN tahun 2007, nilai UAN siswa SMP Negeri 1 Pandaan berhasil meraih peringkat tertinggi di Kabupaten Pasuruan yaitu dengan nilai 29,80. Persentase kelulusan di SMP Negeri 1 Pandaan berhasil mencapai 100%. Rata-rata nilai UAN untuk 3 mata pelajaran antara lain:

Tabel 13
Rata-rata Nilai UAN

No.	Mata Pelajaran	Nilai Rata-Rata
1.	Bahasa Indonesia	8,80
2.	Bahasa Inggris	9,19
3.	Matematika	9,35

Sumber: SMP Negeri 1 Pandaan data diolah

SMP Negeri 1 Pandaan juga terus menambah prestasi non akademik, khususnya di bidang olahraga. Salah satu siswinya yaitu Friska Yessi Rosalina berhasil menjadi delegasi dalam even tingkat ASEAN untuk olahraga renang. Even tersebut bernama ASEAN School yang diselenggarakan di Jakarta dan melibatkan pelajar SMP dan SMA dari seluruh negara ASEAN. (Radar Bromo, 18 Agustus 2007)

Dana BOS di SMP Negeri 1 Pandaan juga digunakan untuk peningkatan mutu guru melalui kegiatan MGMP dan MKKS, seminar dan pelatihan, serta pengadaan perangkat KBK. Kegiatan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan dalam mempersiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi program Kegiatan Belajar Mengajar sehingga dapat menunjang usaha peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan. Kegiatan MGMP dilaksanakan sebulan sekali di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan. Pesertanya adalah 20 sekolah yang ditunjuk secara bergiliran untuk satu mata pelajaran tertentu. Sedangkan MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) juga dilaksanakan tiap bulan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan yang diikuti oleh seluruh kepala sekolah di Kabupaten Pasuruan. Selain itu, untuk meningkatkan mutu pendidik juga diadakan seminar dan pelatihan yang biaya operasionalnya diambil dari dana BOS. Dengan demikian, dana program BOS selalu diarahkan untuk penyelenggaraan pendidikan yang nantinya, meskipun tidak secara langsung, dapat meningkatkan mutu pendidikan. Karena mutu pendidikan ini tidak hanya

berkaitan dengan meningkatnya prestasi siswa saja, tapi termasuk juga kualitas para pendidiknya.

2. Kendala-kendala Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah

Setiap pelaksanaan suatu program pasti terdapat kendala-kendala baik kendala internal maupun kendala eksternal. Dari kendala-kendala yang terjadi tersebut dapat diketahui apakah program berjalan dengan baik atau tidak. Demikian pula dalam pelaksanaan program BOS di SMP Negeri 1 Pandaan.

a. Kendala Intern yakni Hambatan-hambatan yang Ada dalam Pengelolaan Dana BOS SMP Negeri 1 Pandaan

Kendala yang dihadapi oleh SMP Negeri 1 Pandaan mengenai proses pengelolaan. Pengelolaan dana sepenuhnya dipegang oleh bendahara sekolah, sehingga tugas dan tanggung jawab bendahara menjadi bertambah. Ibu Rien Sulistyowati SPd mengatakan, "memang program BOS ini cukup membantu meringankan biaya sekolah. Tapi pengelolaannya itu ruwet. Sedangkan saya sendiri yang mengelola. Jadi kadang waktu pelaporan enggak bias pas tanggalnya. Sekarang saja untuk bulan Juli belum beres, padahal ini sudah masuk Agustus". Menurut penuturan Ibu Rien Sulistyowati SPd, Bendahara SMP Negeri 1 Pandaan, pengelolaan keuangan sekolah malah semakin ruwet, karena pemanfaatan dana harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan penggunaan dana yang ada di Buku Panduan BOS. Disana terdapat batasan-batasan antara hal-hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan terkait pemanfaatan dana BOS ini. Sekolah tidak diberi kebebasan sepenuhnya karena dana BOS ditujukan hanya untuk biaya operasional saja. Bapak Kepsek Hisyam berpendapat,

"program BOS ini program pemerintah yang tidak saya sukai. Karena dana BOS tidak terlalu besar dan tidak seberapa tapi banyak aturan di dalamnya. Tapi bagaimanapun juga ini kan program dari pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan kita, jadi tetap harus kita dukung penuh sebagai wujud dedikasi kami sebagai pendidik." (wawancara dengan Bpk. Hisyam, tanggal 10 Mei 2007)

Meskipun pihak pelaksana di sekolah menganggap program pemerintah yang cukup merepotkan, namun tetap harus didukung penuh dan dilaksanakan dengan maksimal. Sekolah harus mampu memperhitungkan dana yang disesuaikan

dengan ketentuan. Dan SMPN 1 Pandaan dapat melaksanakan sesuai prosedur, mulai dari alokasi penggunaan dana hingga pelaporannya. Namun demikian, pihak sekolah harus tetap melaksanakan program BOS sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah guna meningkatkan mutu pendidikan.

b. Kendala Ekstern yakni Hambatan dari Luar Sekolah

Hambatan atau kendala yang berasal dari luar SMP Negeri 1 Pandaan adalah persepsi masyarakat yang salah terhadap program BOS ini. Masyarakat khususnya orang tua/wali siswa menganggap bahwa dengan adanya program BOS maka biaya pendidikan bisa digratiskan. Padahal kenyataannya tidak semudah itu karena kebutuhan setiap sekolah tidak sama dan pada umumnya jauh lebih besar dari dana BOS. Demikian pula yang terjadi di SMP Negeri 1 Pandaan, dimana kebutuhan biaya pendidikannya jauh melampaui dana bantuan BOS yang hanya sekitar 7,5 % dari total keseluruhan biaya pendidikan sekolah tersebut. Selain itu dana BOS hanya diperuntukkan bagi biaya operasional saja, sehingga biaya sekolah lainnya diambil dari sumbangan orang tua/wali siswa. Pada setiap rapat yang diadakan sekolah dengan orang tua/wali siswa, pihak sekolah sering mendapat keluhan dan protes dari orang tua/wali terkait dengan biaya pendidikan yang dirasa semakin membengkak.

Kesalahan persepsi masyarakat ini salah satunya dipicu oleh iklan layanan masyarakat di televisi yang menyebutkan bahwa sekolah-sekolah yang menerima dana BOS bisa menggratiskan biaya pendidikan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Rien Sulistyowati, Bendahara SMP Negeri 1 Pandaan,

“Wali murid itu menganggap jika ada BOS maka SPP bisa gratis. Padahal *kan* tidak, karena kebutuhan sekolah lebih tinggi dari dana BOS. Memang ada sekolah yang bisa jalan hanya dari dana BOS tapi itu sekolah yang ada di daerah-daerah yang pelosok. Masyarakat ini sudah salah kaprah oleh iklan layanan di televisi yang bilang kalau ada BOS, sekolah bisa gratis. Kalau seperti *kan* ini bisa merepotkan sekolah-sekolah yang biaya pendidikannya jauh diatas dana BOS, seperti di SMP Negeri 1 Pandaan ini”.

Untuk mengatasi perbedaan persepsi tersebut diperlukan komunikasi yang intensif kepada orang tua wali murid terkait dengan program BOS ini. Bentuk komunikasi bisa dilakukan melalui rapat yang diadakan pihak dan orang tua murid dengan Komite Sekolah.

Kepala sekolah SMPN 1 Pandaan menambahkan, “kalau sudah ada prote-protes dari wali murid, kami hanya bisa memberi pengertian pada wali murid bahwa biaya sekolah disini memang lebih dari BOS. Jadi kalau dipaksa gratis ya sulit”. Menanggapi keluhan-keluhan masyarakat berkaitan pungutan-pungutan yang masih ada di SMPN 1 Pandaan, Bpk. Hisyam MPd selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pandaan menjelaskan bahwa kebutuhan biaya pendidikan SMPN 1 Pandaan memang besar. Karena terletak di daerah perkotaan dan dengan mutu sekolah yang sudah maju. Jadi memang sulit untuk menggratiskan biaya pendidikan. Saat ini yang bisa dilakukan hanya bisa meminimalisir biaya pendidikan, yang salah satu dari program BOS.

C. Pembahasan

1. Penerapan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

a. Instansi Terkait dalam Penerapan Program BOS

Pemerintah memiliki kewajiban dalam memberikan pelayanan maksimal di bidang pendidikan. Baik dari segi pembiayaan hingga penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. Hal ini sesuai dengan salah satu fungsi pemerintahan negara menurut Siagian yaitu fungsi pelayanan. Fungsi ini mengindikasikan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan hidup seluruh rakyat yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan aparatur pemerintah kepada rakyat. Melalui program BOS, aparatur pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan di bidang pendidikan. Program BOS adalah salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk membebaskan semua atau sebagian biaya pendidikan yang dikeluarkan orang tua siswa dan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, sebagai wujud penyuksesan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun (Wajar Dikdas 9 Tahun).

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang telah diperoleh di lapangan, diketahui bahwa instansi yang terkait dalam penerapan program BOS memiliki struktur organisasi yang hierarkis. Program BOS ini merupakan program yang dibuat langsung oleh pemerintah pusat maka instansi pelaksana mulai dari tingkat pusat, tingkat propinsi, tingkat kabupaten sampai dengan elemen terbawah

yaitu sekolah/madrasah/pondok pesantren sebagai sasaran dari program BOS. Organisasi pelaksana untuk Program BOS ini terbagi menjadi dua tim yaitu Tim Pengarah dan Tim Manajemen BOS yang berada di setiap tingkat pemerintahan, dimana Departemen Pendidikan nasional bekerjasama dengan Departemen Agama. Sedangkan yang mengelola Program BOS secara langsung adalah Tim Manajemen BOS. Tim Manajemen BOS di setiap tingkat pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Seiring dengan berjalannya program terdapat beberapa perubahan dalam pelaksanaan program BOS yang ditujukan untuk perbaikan kinerja. Perubahan yang dilakukan yaitu pemisahan antara tugas dan tanggung jawab Departemen Pendidikan nasional dengan Departemen Agama. Jika sebelumnya organisasi pelaksana program terdiri atas unsur dari Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama, maka sejak tahun 2007 ini, masing-masing departemen tersebut hanya menangani tugas dan kewenangannya sendiri. Dalam hal ini Departemen Pendidikan hanya menangani pelaksanaan program dengan lembaga sasaran adalah sekolah SD dan SMP baik negeri maupun swasta. Sedangkan Departemen Agama bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program BOS dengan sasaran lembaga yaitu MI/MTs Negeri dan swasta serta pondok pesantren. Dengan demikian, penyelenggaraan program menjadi lebih efektif dan efisien.

Sesuai yang tertuang dalam Buku Panduan pelaksanaan program BOS tahun 2007, tim pelaksana di tingkat kabupaten terdiri atas manajer, seksi pendataan, seksi BOS dan BOS Buku SD, seksi BOS dan BOS Buku SMP, seksi monitoring dan evaluasi dan penyelesaian masalah, serta seksi publikasi. Struktur organisasi tersebut merupakan struktur minimum yang diperlukan. Namun di Kabupaten Pasuruan, tim pelaksananya hanya tiga orang yang merupakan staf dari Subag Perencanaan.

Minimnya tenaga pelaksana tersebut mengakibatkan pelaksanaan program menjadi terhambat, terutama pada saat awal program. Seperti, kegiatan sosialisasi dan monitoring dan evaluasi yang tidak bisa menjangkau keseluruhan lembaga penerima dana BOS, disamping karena kekurangan biaya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan kemudian melibatkan aparat Dinas Pendidikan cabang Kecamatan dan pengawas sekolah yang ada di tiap kecamatan untuk

membantu pelaksanaan program BOS. Selain pembentukan tim pelaksana di tingkat kecamatan.

b. Mekanisme Penyaluran Dana dari Program BOS oleh Tim Manajemen BOS ke Sekolah

Bagian yang penting dalam penerapan program BOS yaitu proses penyaluran dana BOS ke lembaga penerima. Bank Pemerintah/Kantor Pos dilibatkan langsung pada penyaluran dana ke rekening masing-masing lembaga penerima. Dari hasil wawancara, dapat diketahui penyaluran dilakukan oleh Bank Jatim, setelah memperoleh data lembaga-lembaga penerima dari Tim Manajemen BOS Propinsi. Bank Jatim terlebih dahulu melakukan pengecekan kesesuaian data yang diperoleh dari Tim Manajemen BOS Propinsi dari data yang ada di kabupaten. Jika data-data penerima telah sesuai, Bank Jatim dapat menyalurkan dana ke semua rekening lembaga penerima. Proses penyaluran dana ini biasanya membutuhkan waktu lebih dari satu hari, sehingga dapat menimbulkan bunga bank. Oleh karena itu, Tim Manajemen BOS Propinsi harus membuka rekening di Bank Jatim untuk menampung sementara bunga bank tersebut yang nantinya harus diserahkan ke Kas Negara. Keseluruhan dana BOS harus sudah disalurkan ke semua rekening lembaga penerima dana dalam waktu maksimal 3 hari. Dan di Kabupaten Pasuruan sendiri, Bank Jatim telah selesai menyalurkan ke semua rekening dalam waktu sehari.

Proses penyaluran dana BOS di Kabupaten Pasuruan tersebut tidak berbeda jauh dengan aturan-aturan yang tertera dalam Buku Panduan BOS, dimana menurut Buku Panduan BOS penyaluran dana melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Setker PKPS-BBM Propinsi mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dana BOS kepada Dinas Pendidikan Propinsi.
2. Dinas Pendidikan Propinsi setelah melakukan verifikasi atas SPP-LS dimaksud menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS).
3. Dinas Pendidikan Propinsi selanjutnya mengirimkan SPM-LS dimaksud kepada KPPN Propinsi.

4. KPPN Propinsi melakukan verifikasi terhadap SPM-LS untuk selanjutnya menerbitkan SP2D yang membebani rekening Kas Negara.
5. Selanjutnya dana BOS disalurkan ke sekolah penerima BOS melalui Kantor Pos/Bank Pemerintah yang ditunjuk sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendidikan Propinsi dan Lembaga Penyalur (Pos/Bank).
6. Tim PKPS-BBM Kabupaten/Kota dan Sekolah harus mengecek kesesuaian dana yang disalurkan oleh Kantor Pos/Bank dengan alokasi BOS yang ditetapkan oleh Tim PKPS-BBM Kabupaten/Kota. Jika terdapat perbedaan dalam jumlah dana yang diterima, maka perbedaan tersebut harus segera dilaporkan kepada Kantor Pos/Bank bersangkutan dan Tim PKPS-BBM Propinsi untuk diselesaikan lebih lanjut.

Pada awal penerapan BOS, proses penyaluran dana BOS sering mengalami keterlambatan. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2006 terhadap program Wajar Dikdas 9 tahun dan program BOS tahun anggaran 2005 dan tahun 2006 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan menunjukkan adanya keterlambatan penyaluran dana yaitu 1 sampai 20 hari pada tahun 2005 dan di tahun 2006 keterlambatan terjadi antara 1 sampai 15 hari.

Penyaluran dana yang tidak tepat waktu ini disebabkan karena aparat yang masih belum terbiasa dengan program baru tersebut, sehingga perlu melakukan penyesuaian. Kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang terkait dengan penyaluran dana, juga menjadi faktor ketidaktepatan waktu. Pada periode-periode berikutnya telah dilakukan perbaikan kinerja dari instansi-instansi terkait sehingga keterlambatan dana bisa diminimalisir. Hal ini dapat dilihat di tahun 2007 ini, dimana penyaluran dana oleh Bank Jatim telah dilakukan per 3 bulan dan keterlambatan dana tidak terjadi lagi. Pihak sekolah pun telah dapat mengambil dana BOS tiap bulan sehingga sekolah tidak perlu kesulitan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang anggarannya diambil dari BOS.

c. Mekanisme Penerapan Program BOS yang Dilaksanakan di SMP Negeri 1 Pandaan

Program BOS merupakan program pemerintah yang ditujukan untuk pemerataan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar melalui pemberian

Bantuan Operasional Sekolah(BOS). SMP Negeri 1 Pandaan melakukan langkah-langkah aktif untuk mendukung program BOS ini. Langkah-langkah tersebut diawali dengan sosialisasi oleh Kepala sekolah kepada Dewan Guru, dan Komite Sekolah terkait dengan tujuan, sasaran dan penggunaan serta penyaluran dana program BOS. Kemudian, bendahara mendata jumlah siswa di SMP Negeri 1 Pandaan secara keseluruhan. Data siswa ini selanjutnya diusulkan ke Tim Manajemen BOS kabupaten Pasuruan. Setelah usulan data disetujui oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten Pasuruan, sekolah menyusun RAPBS yang disertai perincian tentang penggunaan dana BOS.

Kepala Sekolah dan Bendahara dapat mengambil dana BOS di Bank Jatim setelah dana cair, untuk kemudian dimanfaatkan bagi pembiayaan operasional sekolah seperti yang ada di RAPBS. Meskipun dana BOS telah menjadi hak sekolah, namun sekolah tidak dapat mengambil dana BOS setiap saat di Bank Jatim. Lembaga penerima hanya dapat mengambil dana BOS sebulan sekali. Sebelum mengambil dana BOS, sekolah harus menyerahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bulan sebelumnya dan RAPBS untuk mengambil dana BOS bulan berikutnya kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten Pasuruan. Setelah dilakukan pengecekan atas SPJ dan RAPBS, Tim Manajemen memberikan Bukti Pencairan BOS kepada sekolah sebagai bentuk rekomendasi untuk pengambilan dana di Bank Jatim.

Peraturan tersebut merupakan kebijakan dari Tim Manajemen BOS Kabupaten Pasuruan sendiri. Buku Panduan BOS tidak mengharuskan pengambilan dana harus melalui sejenis rekomendasi/persetujuan dari pihak manapun sehingga dapat menghambat pengambilan dana dan jalannya kegiatan operasional sekolah. Namun demikian, bentuk rekomendasi ini dari Tim Manajemen BOS Kabupaten Pasuruan tersebut bukan merupakan bentuk penyimpangan karena penyerahan SPJ dan RAPBS ditujukan untuk ketertiban pelaporan. Jika tidak dilakukan per bulan, pihak sekolah umumnya enggan untuk membuat laporan pertanggungjawaban sehingga rawan terjadi penyimpangan.

Dana program BOS di SMP Negeri 1 Pandaan dialokasikan untuk biaya operasional sekolah sesuai yang tercantum di RAPBS. Dana BOS tersebut dipergunakan antara lain untuk penerimaan siswa baru/MOS, buku pelajaran

pokok, biaya peningkatan mutu guru, kegiatan evaluasi, kegiatan penyelenggaraan pelajaran, tata usaha sekolah, langganan daya dan jasa, biaya pemeliharaan, membayar honorarium guru dan tenaga kependidikan honorer, membiayai kegiatan siswa dan pelaporan. Kesebelas item pos penggunaan dana BOS di SMP Negeri 1 Pandaan memang tidak sama persis dengan aturan penggunaan dana yang tercantum di Buku Panduan BOS. Hal ini diperbolehkan karena kebutuhan sekolah berbeda dan selama penggunaan dana BOS tidak dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak termasuk dalam kegiatan operasional sekolah. Dalam Buku Panduan BOS, yang antara lain dana BOS tidak boleh digunakan untuk:

- 1) disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan
- 2) dipinjam kepada pihak lain
- 3) membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar
- 4) membayar bonus, transportasi, atau pakaian yang tidak berkaitan dengan kepentingan siswa
- 5) dipakai untuk rehabilitasi sedang dan berat
- 6) membangun gedung/ruangan baru
- 7) membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran
- 8) menanamkan segala jenis kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat dan daerah.

Penentuan alokasi dana BOS di SMP Negeri 1 Pandaan didasarkan pada hasil musyawarah dari semua pihak yaitu Kepala Sekolah, Dewan Guru, Staf Tata Usaha dan Komite Sekolah. Dengan demikian, alokasi penggunaan dana BOS bukan hanya keputusan Kepala Sekolah saja, namun merupakan hasil kesepakatan bersama agar pemanfaatan dana BOS bisa tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Pihak sekolah tidak melibatkan orang tua /wali murid dalam rapat tersebut. Pihak sekolah hanya memberitahukan hasil akhir saja secara umum. Akan tetapi bukan berarti sekolah tertutup kepada masyarakat. Bagi masyarakat yang ingin mengetahui secara lengkap tentang RAPBS atau tentang penggunaan BOS dapat dilihat dengan mudah di Kantor Tata Usaha. Ini

menunjukkan bahwa SMP Negeri 1 Pandaan berusaha transparan kepada masyarakat terutama terkait dengan program BOS.

d. Mekanisme Monitoring dan Pelaporan Program BOS yang Dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota pada Sekolah.

Pelaksanaan suatu program pemerintah memerlukan monitoring dan evaluasi sehingga proses memantau dan menguji serta merupakan analisis terhadap hasil akhir dari program tersebut. Kegiatan monitoring dapat memudahkan para pelaksana program untuk mengendalikan kegiatan program dan perbaikan bagi pelaksanaan program berikutnya. Kegiatan monitoring dalam penerapan program BOS meliputi pemantauan pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BOS.

Tim Manajemen BOS Kabupaten Pasuruan telah melakukan kegiatan monitoring setiap akhir semester sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Buku Panduan BOS. Kegiatan monitoring bertujuan untuk memantau penyaluran dan penyerapan dana sekolah serta memantau penggunaan dan di tingkat sekolah. Minimnya dana safeguarding dan keterbatasan tenaga pelaksana menyebabkan kegiatan monitoring dan evaluasi menjadi terbatas pada sekolah-sekolah tertentu saja, sehingga kurang bisa diketahui bagaimana penerapan program BOS sebenarnya, apakah telah mampu dilaksanakan dengan baik dan tertib atau masih terdapat kesulitan-kesulitan, atau bahkan terjadi penyimpangan-penyimpangan.

Walaupun masih terdapat beberapa kekurangan, akan tetapi pelaksanaan program BOS di Kabupaten Pasuruan dan khususnya di SMP Negeri 1 Pandaan berlangsung relatif tertib. Hal ini terlihat dari belum adanya kasus yang mengindikasikan telah terjadi pelanggaran berat yang menyebabkan seseorang atau lembaga penerima dana BOS mendapatkan sanksi.

d. Hasil Penerapan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 1 Pandaan

Setelah melakukan penelitian ini, program BOS dapat dikatakan telah cukup membantu dalam kelancaran kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 1 Pandaan. Dana BOS yang dialokasikan SMP Negeri 1 Pandaan sebesar Rp. 302.758.500,00

telah dipergunakan dengan baik dalam rangka mencapai target untuk memberikan pendidikan dasar hingga 9 tahun (Wajar Dikdas 9 Tahun). Dana program BOS dapat memperluas dan pemeratakan akses berbagai kelompok masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas, meringankan beban biaya siswa yang tidak mampu untuk mengikuti pendidikan, bahkan dapat membebaskan biaya pendidikan (pendidikan gratis) bagi masyarakat miskin. Di samping itu juga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan dasar dan menengah, serta mengurangi angka putus sekolah. Dana itu juga dapat menjadi sumber daya penting bagi sekolah dan jajaran pendidikan untuk meningkatkan kinerja pendidikan sekolah, kualitas layanan sekolah dan memperbaiki manajemen sekolah. Program BOS yang diterapkan di SMP Negeri 1 Pandaan ini secara umum dinilai cukup berhasil. Hal ini terbukti dari lancarnya pelaksanaan program BOS ini.

Indikator peningkatan mutu pendidikan ditentukan oleh banyak faktor dan dapat diketahui hasilnya dalam jangka waktu yang cukup lama. Program BOS yang dicanangkan oleh pemerintah ini menjadi salah satu faktor pendukung peningkatan mutu pendidikan. Program BOS merupakan bentuk bantuan pemerintah yang dikhususkan untuk membiayai operasional sekolah. Sekolah yang menerima dana BOS dapat merasakan berbagai manfaat yang diperoleh dari program tersebut. Jika masyarakat dapat mengakses pendidikan secara merata, maka kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan melalui pendidikan tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Tilaar dalam Bab Kajian Pustaka bahwa pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan nilai tambah dan kualitas sumber daya manusia.

Demikian pula di SMP Negeri 1 Pandaan, adanya dana BOS telah mampu mengurangi biaya SPP per bulan. Siswa hanya dibebani biaya SPP per bulan sebesar Rp. 17.500,00, sedangkan sebelum ada dana BOS, orang tua siswa harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 45.000,00 setiap bulannya. Manfaat program BOS juga sangat dirasakan oleh siswa-siswa yang tergolong tidak mampu di SMP Negeri 1 Pandaan. Mereka dibebaskan dari biaya SPP per bulan dan sumbangan gedung. Akan tetapi, pihak sekolah masih menarik pungutan hingga ratusan ribu rupiah kepada orang tua siswa untuk buku-buku LKS dan bimbingan belajar.

Namun, secara umum keberadaan dana BOS belum memberikan hasil yang signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Pandaan. Hal ini karena SMP Negeri Pandaan merupakan sekolah menengah di Kabupaten Pasuruan yang memiliki mutu pendidikan yang cukup maju, baik sebelum maupun setelah ada program BOS. Dana BOS hanya digunakan untuk membiayai operasional sekolah saja yang sebelumnya dibiayai melalui iuran siswa. Sedangkan peningkatan mutu pendidikan ditentukan oleh banyak faktor dan dapat diketahui hasilnya dalam jangka waktu lama. Selain itu, dana BOS juga tidak berpengaruh terhadap angka putus sekolah di SMP Negeri 1 Pandaan, karena angka putus sekolah di sekolah tersebut adalah nol atau dengan kata lain semua siswa telah mampu menuntaskan pendidikannya. Meski demikian, dana BOS sangat mendukung kelancaran Kegiatan Belajar Mengajar di SMP Negeri 1 Pandaan.

Meskipun secara langsung program BOS belum berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan, program ini tetap merupakan upaya aktif pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan. Jika dikaitkan dengan teori pembangunan, yang paling tepat adalah konsep pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development*) dengan memfokuskan pada pemberdayaan manusia (*the empowerment people*).

Sumber daya manusia yang berkualitas diharapkan dapat menjadi subyek pembangunan untuk lebih berhasil mengelola sumber daya bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat. Pada gilirannya adalah upaya bangsa ini untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya melalui pelaksanaan pembangunan dapat berjalan efektif.

2. Kendala-kendala Penerapan Program Bantuan Operasional Sekolah

Setiap program yang diterapkan pasti memiliki kendala-kendala atau hambatan-hambatan, mulai dari awal penerapannya hingga pada saat monitoring dan evaluasi dari program tersebut. Demikian pun pada program BOS di SMP Negeri 1 Pandaan tidak lepas dari kendala-kendala, baik kendala intern maupun kendala ekstern. Kendala intern yang dimaksud disini adalah hambatan-hambatan yang ada dalam pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 1 Pandaan, sedangkan

kendala ekstern yakni hambatan yang berasal dari luar sekolah. Meskipun kendala tersebut bukan kendala yang besar, akan tetapi hendaknya diperhatikan dan dicari alternatif pemecahannya dengan mendukung dan melaksanakan program BOS serta optimalisasi hasil yang akan dicapai, yakni pemerataan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar dan peningkatan mutu pendidikan.

Kendala intern yang terjadi dalam pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 1 Pandaan adalah kurangnya tenaga pelaksana. Karena dana BOS hanya ditangani oleh Bendahara Sekolah saja. Mulai dari proses pendataan, penyusunan RABPS hingga pelaporan. Kurangnya tenaga pelaksana ini dapat menghambat kelancaran kerja. Pengelolaan dana BOS menjadi tidak bisa tepat waktu. Misalnya pada saat penyusunan SPJ. Bendahara bertanggung jawab menyusun SPJ setiap bulannya untuk kemudian diserahkan kepada pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan. Bendahara terkadang terlambat menyerahkan SPJ karena pekerjaan yang tumpang tindih antara tugas-tugas dan tanggung jawab rutin sebelumnya sebagai bendahara sekolah sekaligus guru pengajar dan tugas tambahan untuk mengelola dana BOS. Bendahara pun juga tidak bisa begitu saja melimpahkan tugas dan tanggung jawab pengelolaan kepada staf lain. Hal ini dikarenakan yang memahami dengan baik pengelolaan dana BOS adalah kepala sekolah dan bendahara. Sosialisasi program BOS pada lembaga penerima memang hanya diperuntukkan bagi kepala sekolah dan bendahara saja. Oleh karena itu, pengelolaan BOS sepenuhnya dipegang oleh bendahara, sedangkan kepala sekolah sebagai penanggung jawab.

Selain itu, kendala lain yang dihadapi dalam tentang pengalokasian dana. Dimana ada aturan dalam Buku Panduan BOS yang menyebutkan tentang penggunaan dana BOS. Disana diatur mengenai kegiatan-kegiatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dibiayai oleh dana BOS. Tenaga pelaksana di SMP Negeri 1 Pandaan sedikit mengalami kesulitan saat pengalokasian dana karena dikhawatirkan pos-pos anggaran yang memperoleh dana BOS tidak termasuk pada kegiatan-kegiatan yang diijinkan memakai dana BOS.

Terjadinya kesalahan persepsi masyarakat khususnya orang tua siswa terhadap dana BOS menjadi kendala ekstern bagi kelancaran penerapan BOS di SMP Negeri 1 Pandaan. Orang tua siswa menganggap dengan adanya BOS,

pendidikan bisa digratiskan. Kesalahan persepsi ini muncul karena sosialisasi yang kurang tepat, khususnya mengenai pembebasan iuran siswa. Salah satu sosialisasi bagi masyarakat umum yang berupa iklan layanan masyarakat. Iklan tersebut menyiratkan pesan bahwa dana BOS akan dapat menggratiskan biaya pendidikan. Padahal, pada prakteknya tidak semudah itu karena kebutuhan setiap sekolah tidak sama. Persepsi masyarakat mengenai pendidikan gratis menjadi semakin kuat ketika pihak sekolah kurang memberikan pemahaman yang jelas tentang program BOS kepada masyarakat terutama orang tua siswa.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian dan pembahasan terhadap permasalahan pada bab-bab sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan tentang penerapan program BOS di SMP Negeri 1 Pandaan. Selain itu, juga akan dikemukakan beberapa saran yang kiranya dapat dijadikan sebagai salah satu masukan untuk perkembangan program, sehingga di masa depan bisa dilaksanakan dengan lebih baik lagi.

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penyajian data sebelumnya, telah diperoleh suatu kesimpulan:

1. Penerapan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dikelola oleh instansi-instansi di setiap tingkat pemerintahan mulai dari tingkat pusat hingga pada level terbawah yaitu lembaga penerima dan masing-masing tim pelaksana memiliki tugas dan tanggung jawabnya. Di Kabupaten Pasuruan, program BOS hanya dikelola oleh tiga orang staf dari Subag Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Minimnya tenaga pelaksana tersebut mengakibatkan pelaksanaan program menjadi terhambat, terutama pada saat awal program.
2. Penyaluran dana BOS di Kabupaten Pasuruan dilaksanakan oleh Bank Jatim. Penyaluran dilakukan setelah data-data yang diperoleh sesuai agar dana yang disalurkan ke lembaga-lembaga penerima bisa tepat sasaran. Bank Jatim telah selesai menyalurkan ke semua rekening dalam waktu sehari. Meskipun sebelumnya sering terjadi keterlambatan yang disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara instansi yang terkait.
3. Penerapan program BOS di SMP Negeri 1 Pandaan dapat dilaksanakan dengan lancar. Dana BOS dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam operasional sekolah sesuai yang tertuang di RAPBS. Sebelum mengambil dana BOS, sekolah harus menyerahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bulan sebelumnya dan RAPBS untuk mengambil dana BOS bulan berikutnya kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten Pasuruan. Peraturan tersebut merupakan kebijakan dari Tim Manajemen BOS Kabupaten Pasuruan sendiri dan ditujukan untuk ketertiban pelaporan. Sedangkan penentuan

alokasi dana BOS di SMP Negeri 1 Pandaan didasarkan pada hasil musyawarah dari semua pihak yaitu Kepala Sekolah, Dewan Guru, Staf Tata Usaha dan Komite Sekolah.

4. Kegiatan monitoring dalam penerapan program BOS meliputi pemantauan pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BOS. Kegiatan monitoring bertujuan untuk memantau penyaluran dan penyerapan dana sekolah serta memantau penggunaan dan di tingkat sekolah. Namun, kegiatan monitoring ini tidak dapat dilaksanakan di setiap lembaga penerima dana BOS. Hal ini disebabkan karena keterbatasan tenaga dan dana untuk kegiatan monitoring tersebut.
5. Dana BOS yang dialokasikan SMP Negeri 1 Pandaan telah dipergunakan dengan baik dalam rangka mencapai target untuk memberikan pendidikan dasar hingga 9 tahun (Wajar Dikdas 9 Tahun). Adanya dana BOS telah mampu mengurangi biaya SPP per bulan. Secara khusus umum keberadaan dana BOS tidak memberikan hasil yang signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Pandaan. Dana BOS juga tidak berpengaruh terhadap angka putus sekolah di SMP Negeri 1 Pandaan, karena angka putus sekolah di sekolah tersebut adalah nol atau dengan kata lain semua siswa telah mampu menuntaskan pendidikannya.
6. Kendala intern yang terjadi dalam pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 1 Pandaan adalah kurangnya tenaga pelaksana. Kurangnya tenaga pelaksana ini dapat menghambat kelancaran kerja. Kendala lain yang dihadapi dalam tentang pengalokasian dana. Tenaga pelaksana di SMP Negeri 1 Pandaan sedikit mengalami kesulitan saat pengalokasian dana karena dikhawatirkan pos-pos anggaran yang memperoleh dana BOS tidak termasuk pada kegiatan-kegiatan yang diijinkan memakai dana BOS. Sedangkan yang menjadi kendala ekstern yaitu terjadinya kesalahan persepsi masyarakat khususnya orang tua siswa terhadap dana BOS di SMP Negeri 1 Pandaan. Orang tua siswa menganggap dengan adanya BOS, pendidikan bisa digratiskan. Padahal, pada prakteknya tidak semudah itu karena kebutuhan setiap sekolah tidak sama.

B. Saran

1. Pemerintahan diharapkan bisa melanjutkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk tahun-tahun berikutnya karena memang dapat meringankan sekolah dan siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar-mengajar. Program sudah berjalan dengan benar, karena siswa yang miskin sudah terbantu dalam bentuk pembebasan iuran pendidikan secara penuh. Sedangkan siswa yang tergolong mampu tetap membayar iuran yang sudah disesuaikan setelah sekolah mendapatkan.
2. Pemerintah sebaiknya menambah jumlah dana pendidikan yang diberikan kepada masyarakat agar pendidikan gratis dapat diwujudkan. Jika pendidikan gratis dapat diwujudkan, maka seluruh masyarakat dapat mengakses pendidikan.
3. Perlu adanya koordinasi yang baik antara pihak-pihak yang terkait agar pengelolaan dana BOS menjadi lebih tertib dan lancar. Dengan demikian tidak terjadi lagi keterlambatan, penyaluran dana yang tidak tepat sasaran, kesalahan dari segi administratif, dll.
4. Sebaiknya tenaga pelaksana ditambah, baik di tingkat Kabupaten Pasuruan maupun di SMP Negeri 1 Pandaan. Adanya staf tambahan yang membantu ini diharapkan dapat memperlancar pengelolaan program BOS.



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 1 PANDAAN

Jl. Raya Kebonwaris No. 17 Pandaan Telp. 0343-631831 Fax. 0343-630803
E-mail : smpn1pandaan@yahoo.com Kab. Pasuruan Kode Pos : 67156

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800 / 746 / 424.059.11.III.01/2007.

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : HISYAM, MPd
NIP. : 131613660
Pangkat / Gol. Ruang : Pembina / IV/a
Jabatan : Kepala SMP Negeri 1 Pandaan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : IKA DESI ALINDA
NIM : 0310310066
Jurusan : Administrasi Publik
Konsentrasi : Administrasi Pembangunan
Universitas / Fakultas : Universitas Brawijaya / Fakultas Ilmu Administrasi
Alamat : Jl. Juanda No. 25B, RT 03/RW VI, Jogosari
Kecamatan Pandaan, Kab. Pasuruan

Yang bersangkutan benar-benar telah melaksanakan riset / survey dengan tema "Penerapan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) guna meningkatkan mutu pendidikan" selama 2 (dua) bulan pada bulan April dan Mei 2007.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pandaan, 13 Desember 2007

Kepala Sekolah,



HISYAM, MPd
NIP. 131613660

CURRICULUM VITAE

Nama : Ika Desi Alinda
Nomor Induk Mahasiswa : 0310310066-31
Tempat dan Tanggal Lahir : Pasuruan, 19 Desember 1983
Pendidikan :

- | | |
|---|-----------------|
| 1. SD Jogosari 02 | Tahun 1990-1996 |
| 2. SMP Negeri 1 Pandaan | Tahun 1996-1999 |
| 3. SMA 1 Pandaan | Tahun 1999-2002 |
| 4. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya | Tahun 2003-2007 |

